



**LAPORAN PENELITIAN ANALISIS ALOKASI POLA
KONSUMSI PENERIMA BANTUAN SOSIAL
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2021**

**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
BEKERJASAMA DENGAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1. Konsep Kemiskinan.....	6
2.2. Teori Lingkaran Setan Kemiskinan.....	7
2.3. Kemiskinan Dari Sisi Penawaran	7
2.4. Kemiskinan Dari Sisi Permintaan	8
2.5 Jenis-jenis Kemiskinan.....	8
2.6. Penyebab Kemiskinan	9
2.7. Kebijakan Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan	9
2.7.1. Program Keluarga Harapan (PKH)	9
2.7.2. BLT (Bantuan Langsung Tunai)	11
2.7.3. PIP (Program Indonesia Pintar).....	12
2.7.4. KKS (Kartu Keluarga Sejahtera).....	13
2.7.5. BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai).....	16
2.8. Kerangka pemikiran	19
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	21
3.1. Jenis Penelitian	21
3.2. Lokasi Penelitian	21
3.3. Ruang Lingkup Penelitian	22
3.4. Jenis dan Sumber Data	22
3.5. Teknik Pengumpulan Data	22
3.6. Teknik Analisis Data	23
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	25
4.1. Hasil Penelitian.....	25

4.1.1. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Bangka	25
4.1.2. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Bangka Selatan	25
4.2. Karakteristik Responden	26
4.2.1. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Bantuan yang Diterima	26
4.2.2. Umur Responden di Kabupaten Bangka dan Bangka Selatan	27
4.2.3. Status Pernikahan Responden di Kabupaten Bangka Dan Bangka Selatan	28
4.2.4. Pendidikan Responden di Kabupaten Bangka Dan Bangka Selatan	29
4.2.5. Status Kepemilikan Rumah Responden di Kabupaten Bangka.....	30
4.2.6. Status Kepemilikan Rumah Responden di Kabupaten Bangka Selatan...	31
4.2.7. Jenis Pekerjaan Responden di Kabupaten Bangka.....	32
4.2.8. Jenis Pekerjaan Responden Kabupaten Bangka Selatan	33
4.2.9. Pendapatan Responden Kabupaten Bangka dan Bangka Selatan	34
4.2.10. Karakteristik Pola Konsumsi Responden di Kabupaten Bangka	35
4.2.11. Karakteristik Pola Konsumsi Responden di Kabupaten Bangka Selatan.....	37
4.3. Hasil Analisis.....	39
4.3.1. Hasil Regresi Pengaruh PKH Terhadap Biaya Pendidikan	39
4.3.2. Hasil Regresi Pengaruh PKH Terhadap Biaya Makanan.....	39
4.3.3. Hasil Regresi Pengaruh PKH Terhadap Biaya Kesehatan	40
4.3.4. Hasil Regresi Pengaruh BPNT Terhadap Biaya Makanan	40
4.3.5. Hasil Regresi Pengaruh PIP Terhadap Biaya Pendidikan.....	40
4.3.6. Hasil Regresi Parsial	41
4.4. Persepsi Masyarakat Mengenai Program Bantuan	43
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	44
5.1. Kesimpulan.....	44
5.2. Saran dan Rekomendasi	45
DAFTAR PUSTAKA.....	46
LAMPIRAN.....	48

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Masyarakat yang Terdata Penerima Bantuan pada DTKS Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2020.....	3
Tabel 1.2 Persentase Rumah Tangga Penerima Bantuan Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020.....	4
Tabel 3.1 Pemetaan Responden Kabupaten Bangka Selatan dan Bangka.....	22
Tabel 4.1 Pengaruh Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Pendidikan.....	39
Tabel 4.2 Pengaruh Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Biaya Makanan.....	39
Tabel 4.3 Pengaruh Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Biaya Kesehatan.....	40
Tabel 4.4 Pengaruh Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Terhadap Biaya Makanan.....	40
Tabel 4.5 Pengaruh Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Terhadap Pendidikan.....	40
Tabel 4.6 Hasil Koefisien Regresi Parsial	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Lingkaran Kemiskinan dari Segi Penawaran	7
Gambar 2.2 Lingkaran Kemiskinan dari Segi Permintaan	8
Gambar 2.3 Proses Pendaftaran Peserta BPNT	17
Gambar 2.4 Pemanfaatan Dana BPNT oleh KPM.....	18
Gambar 2.5 Kerangka Pemikiran.....	19
Gambar 4.1 Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Bantuan yang Diterima	26
Gambar 4.2 Umur Responden di Kabupaten Bangka dan Bangka Selatan	27
Gambar 4.3 Status Pernikahan Responden di Kabupaten Bangka Dan Bangka Selatan	28
Gambar 4.4 Pendidikan Responden di Kabupaten Bangka Dan Bangka Selatan.....	29
Gambar 4.5 Status Kepemilikan Rumah Responden di Kabupaten Bangka	30
Gambar 4.6 Status Kepemilikan Rumah Responden di Kabupaten Bangka Selatan	31
Gambar 4.7 Jenis Pekerjaan Responden di Kabupaten Bangka	32
Gambar 4.8 Jenis Pekerjaan Responden di Kabupaten Bangka Selatan.....	33
Gambar 4.9 Pendapatan Responden Kabupaten Bangka dan Bangka Selatan	34
Gambar 4.10 Karakteristik Pola Konsumsi Responden di Kabupaten Bangka	35
Gambar 4.11 Rata-Rata Karakteristik Pola Pengeluaran Konsumsi Masyarakat di Kabupaten Bangka.....	36
Gambar 4.12 Karakteristik Pola Konsumsi Responden di Kabupaten Bangka Selatan	37
Gambar 4.13 Rata-Rata Karakteristik Pola Pengeluaran Konsumsi Masyarakat di Kabupaten Bangka Selatan	38
Gambar 4.14 Persepsi Masyarakat Terhadap Program Bantuan	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan permasalahan yang cukup sentral dalam aktivitas pembangunan ekonomi yang berkualitas. Tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kesuksesan suatu perekonomian juga ditunjukkan oleh rendahnya persentase penduduk miskin serta pemerataan distribusi pendapatan pada masyarakat. Todaro dan Smith (2006) menyatakan bahwa kemiskinan akan semakin meningkat selama distribusi pendapatan belum merata. Bourguignon (2004) juga menjelaskan jika pertumbuhan yang dihasilkan diimbangi dengan distribusi pendapatan yang merata, maka pengurangan kemiskinan akan lebih efektif.

Kemiskinan merupakan keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan air minum (Binti, 2016). Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara (Sudiar, 2015). Menurut Yacoub (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar, karena kemiskinan menyangkut pemenuhan kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan dan kemiskinan merupakan masalah global karena kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi banyak negara. Salah satu sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset (*lack of income and assets*) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima (*acceptable*) (World Bank, 2004). Di samping itu kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin (*the poor*) tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai (Ferezagia, 2018). Untuk itu peningkatan kapasitas ekonomi kurang memberikan manfaat bagi penduduk miskinnya.

Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu program utama yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengejar pembangunan ekonomi yang berkualitas. Keberhasilan program pengentasan kemiskinan bergantung pada identifikasi kelompok dan wilayah yang ditargetkan seperti siapa yang miskin dan di mana mereka tinggal (Remi *et al*, 2002). Rapat Pleno Strategi

Pengentasan yang dipimpin oleh wakil Presiden Ma'Ruf Amin (2020) mengusulkan upaya pengentasan kemiskinan dengan mengurangi beban pengeluaran masyarakat dengan pendapatan rendah dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Untuk menurunkan beban pengeluaran, berbagai upaya yang dilakukan adalah melalui perbaikan dan perluasan program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), program bantuan pangan (Rastra dan Bantuan Pangan Non-Tunai), Program Indonesia Pintar (PIP) dan Program Indonesia Pintar Kuliah (PIP-K). Didorong pula perbaikan jaminan sosial melalui program Indonesia sehat atau Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta reformasi kebijakan subsidi energi termasuk subsidi listrik dan subsidi LPG. Sementara, upaya untuk mendorong peningkatan pendapatan salah satunya dilakukan melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berperan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi sehingga dianggap dapat mengentaskan kemiskinan dan mampu mengurangi pengangguran serta mampu menyerap tenaga kerja (Sofah, *et al*, 2020).

1.2. Perkembangan Rumah Tangga yang Terdata Penerima Bantuan

Habibullah (2019) menyatakan bahwa terdapat 6 (enam) faktor yang dapat mempengaruhi angka kemiskinan, diantaranya adalah tingkat upah buruh harian. Diketahui bahwa upah buruh harian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cukup tinggi dan ini menjadi salah satu faktor rendahnya angka kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung jika dibandingkan dengan provinsi lain. Faktor kedua adalah Nilai Tukar Petani (NTP), diketahui bahwa NTP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 berada pada level 103.95, masih lebih tinggi apabila dibandingkan dengan NTP level nasional yang berada pada angka 101.65. Faktor ketiga adalah nilai inflasi daerah yang cukup stabil menyebabkan masyarakat bisa mempertahankan tingkat kesejahteraannya pada nilai yang relatif tidak berubah. Faktor keempat adalah nilai Harga Eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah terhadap harga pangan seperti beras, telur, daging dan komoditas lainnya. Faktor kelima adalah kemampuan masyarakat yang tingkat rata-rata pengeluarannya pada Desil 1 (kelompok pendapatan terendah) yang meningkat akan bisa mengurangi angka kemiskinan dengan sangat besar pengaruhnya. Berhubungan dengan faktor kelima, faktor keenam memiliki keterkaitan yang cukup erat dimana hal tersebut adalah faktor bantuan pemerintah dalam menjaga kuota bantuan pangan non tunai bagi masyarakat golongan pendapatan terendah sehingga bisa keluar dari garis kemiskinan. Berikut perkembangan

persentase penduduk miskin menurut kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 hingga tahun 2020.

**Tabel 1.1 Rumah Tangga yang Terdata Penerima Bantuan
pada DTKS Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2016-2020**

Kabupaten	Rumah Tangga Desil 1
Bangka	1040
Bangka Barat	286
Bangka Selatan	253
Bangka Tengah	570
Belitung	999
Belitung Timur	496
Pangkalpinang	650
Total	4294

Sumber: Data DTKS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan Tabel 1.1. DTKS dijelaskan bahwa rumah tangga penerima bantuan pada desil 1. Desil 1 yaitu rumah tangga/individu dengan kondisi kesejahteraan 10 persen terendah di Indonesia (Pusdatin Kesos, 2020). Data Desil 1 menunjukkan bahwa Kabupaten Bangka merupakan kabupaten yang jumlah rumah tangga yang tertinggi sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Bangka Selatan. Pemilihan desil 1 sebagai indikator penentuan lokasi Survei diharapkan memberikan gambaran yang kontras terhadap pola konsumsi masyarakat yang berada pada kedua Kabupaten tersebut.

Data survei Susenas Tahun 2020 menunjukkan bahwa sebanyak 2,62 persen dari penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pernah menerima bantuan dan subsidi dari pemerintah daerah. Terdapat 46,81 persen dari penduduk penerima bantuan menerima bantuan secara rutin dan 39,33 penduduk menerima bantuan secara tidak rutin, dengan rincian seperti pada Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1. Persentase Rumah Tangga Penerima Bantuan Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020

Wilayah	Pernah Menerima Bantuan dan Subsidi dari Pemerintah Daerah	Bantuan Rutin	Bantuan Tidak Rutin
Bangka	2,69	40,30	48,48
Belitung	2,15	31,22	50,55
Bangka Barat	3,97	79,92	37,52
Bangka Tengah	5,46	27,07	28,70
Bangka Selatan	1,30	40,60	27,95
Belitung Timur	1,29	35,80	66,67
Pangkalpinang	1,20	78,28	29,43
Kep. Bangka Belitung	2,62	46,81	39,33

Sumber: Susenas Maret, 2020

Hasil survei menunjukkan bahwa penerima bantuan subsidi tertinggi berada di Kabupaten Bangka Tengah dengan total penduduk penerima sebanyak 5,46 persen sedangkan penduduk wilayah Kota Pangkalpinang menjadi lokasi penerima bantuan terendah yaitu 1,2 persen dari keseluruhan penerima bantuan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sedangkan jika dilihat dari persentase penerima bantuan rutin maka diketahui bahwa penduduk Kabupaten Bangka Barat merupakan penerima tertinggi dengan persentase sebesar 79,92 persen, dan Kabupaten Bangka Tengah terendah dengan persentase sebesar 27,07 persen. Untuk penerima bantuan tidak rutin diketahui Kabupaten Belitung Timur memiliki persentase tertinggi sebesar 6,67 persen dan Kabupaten Bangka Tengah terendah dengan persentase sebesar 27,95 persen.

Untuk mengurangi meningkatnya tingkat disparitas pendapatan, diperlukan kajian dalam melakukan pendalaman terhadap distribusi kesejahteraan yang dinikmati oleh masyarakat akibat dari instrumen bantuan sosial yang sudah disalurkan. Penyaluran bantuan sosial tentunya memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan golongan masyarakat bawah untuk mengurangi disparitas pendapatan tersebut. Penelitian ini melakukan identifikasi mengenai pola konsumsi rumah tangga penerima bantuan yang terdata pada DTKS Kementerian Sosial RI. Data responden diambil dari DTKS desil 1 dan dilakukan survei terhadap pola konsumsi dengan metode regresi pada data Cross section level rumah tangga.

Saat ini, pemerintah banyak menyalurkan program bantuan sosial baik dalam bentuk tunai maupun nontunai melalui instrumen kebijakan PKH (Program Keluarga Harapan), Kartu Pra Kerja, BLT (Bantuan Langsung Tunai), PIP (Program Indonesia Pintar), KKS (Kartu Keluarga

Sejahtera), dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai). Penyaluran bantuan rutin maupun tidak rutin oleh pemerintah harus di telusuri lebih lanjut. Penelusuran akan difokuskan pada efektifitas dengan melihat pola perilaku konsumsi masyarakat terhadap bantuan tersebut.

Kajian ini akan melakukan survei pada level Rumah Tangga dengan mengambil 2 lokasi utama yaitu Kabupaten Bangka (Rumah tangga dengan golongan desil 1 (satu) tertinggi), Kabupaten Bangka Selatan (Rumah tangga dengan golongan desil 1 (satu) terendah). Pemilihan responden pada penelitian ini akan terfokus pada masyarakat yang pernah menerima bantuan yang terdata pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Tahun 2020. Hasil survei akan memberikan suatu gambaran mengenai alokasi pola konsumsi penerima bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan menggunakan metode kuantitatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Kemiskinan

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dan Departemen Sosial, kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (baik makanan maupun non makanan). Dalam teori ekonomi, semakin tinggi tingkat kesejahteraan seseorang maka semakin banyak barang yang dikonsumsi. Tingkat kesejahteraan didefinisikan sebagai kemampuan untuk menggali sumber daya yang tersedia (barang yang dikonsumsi). Kemampuan memperoleh sumber daya yang tersedia dapat diukur dari pendapatan atau pengeluaran seseorang (Widyastuti, 2012).

Untuk mengukur kemiskinan, Indonesia melalui BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs*) yang dapat diukur dengan angka atau hitungan Indeks Perkepala (*Head Count Index*), yakni jumlah dan persentase penduduk miskin yang berada dibawah garis kemiskinan. Terdapat beberapa indikator kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (2009) sebagai berikut:

- a. Ketidakmampuan memenuhi konsumsi dasar (sandang, pangan dan papan).
- b. Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi).
- c. Tidak adanya jaminan masa depan
- d. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya alam.
- e. Kurangnya apresiasi dalam kegiatan sosial masyarakat.
- f. Tidak adanya akses dalam lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.

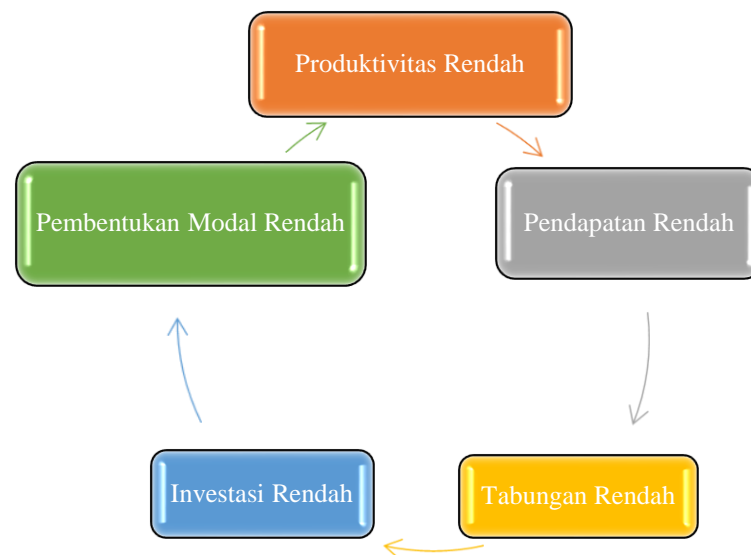
2.2. Teori Lingkaran Setan Kemiskinan

Lingkaran Kemiskinan merupakan rangkaian dari pengaruh timbal balik yang menyebabkan suatu negara tetap miskin dan sulit mencapai pembangunan yang lebih tinggi (Arsyad, 2016). Nurkse menjelaskan bahwa kemiskinan tidak hanya diakibatkan oleh pembangunan dimasa lalu, tetapi juga menjadi faktor penghambat pembangunan di masa depan. Menurut Nurkse teori lingkaran setan menunjukkan keterbelakangan untuk mengatasi

kemiskinan yang terjadi dan dapat dicegah melalui pendidikan yang berkualitas guna mendapatkan ilmu pengetahuan. Lingkaran kemiskinan dari segi penawaran dan segi permintaan.

2.3. Kemiskinan Dari Sisi Penawaran

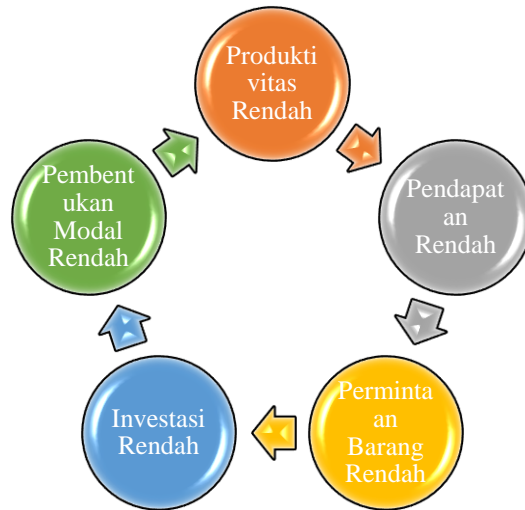
Kemiskinan dari sisi penawaran menjelaskan jika produktivitas yang rendah dapat menyebabkan pendapatan menjadi rendah sehingga menyebabkan kemampuan seseorang untuk menabung menjadi sedikit dan berakibat pada investasi seseorang. Kemampuan investasi yang rendah akan mengakibatkan suatu negara kekurangan barang modal sehingga produktifitas akan tetap berada di posisi yang rendah (Mahendra, 2019).



Gambar 2.1 Lingkaran Kemiskinan dari Sisi Penawaran
Sumber: Nurkse dalam Jhinghan (2000)

2.4. Kemiskinan Dari Sisi Permintaan

Kemiskinan dari segi permintaan, jika pasar untuk berbagai komoditas barang sangat terbatas, maka investasi menjadi sangat rendah. Hal tersebut menyebabkan pendapatan masyarakat semakin rendah. Rendahnya pendapatan masyarakat tersebut disebabkan oleh produktifitas yang rendah akibat terbatasnya pembentukan modal dimasa lalu. Keterbatasan pembentukan modal disebabkan karena kurangnya motivasi terhadap investasi sehingga kemiskinan tidak terputus (Mahendra, 2019).



Gambar 2.2 Lingkaran Kemiskinan dari Sisi Permintaan

Sumber : Nurkse dalam Jhinghan (2000)

2.5. Jenis-jenis Kemiskinan

Pola kemiskinan ada empat yaitu, Pertama adalah *persistent poverty*, yaitu kemiskinan kronis atau kemiskinan genetik. Pola kedua adalah *cyclical poverty*, yaitu kemiskinan yang mengikuti pola seluruh siklus ekonomi. Pola ketiga adalah *seasonal poverty*, yaitu kemiskinan musiman bagi nelayan dan petani tanaman pangan. Pola keempat adalah *accidental poverty*, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan yang menyebabkan tingkat kesejahteraan menurun (Subianto, 2018). Pada dasarnya definisi kemiskinan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu:

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi ketika seseorang memiliki pendapatan lebih rendah yang berkaitan dengan kebutuhan pokok untuk hidup secara layak seperti pangan, sandang dan papan agar dapat menjamin kelangsungan hidup.

2. Kemiskinan Relatif

Dilihat dari ketimpangan sosial, hal ini dikarenakan sebagian masyarakat sudah mampu memenuhi kebutuhan dasar. Semakin besar jarak antara kelas atas dan kelas bawah maka semakin besar jumlah penduduk yang tergolong miskin, sehingga kemiskinan memiliki hubungan yang erat distribusi pendapatan.

2.6. Penyebab Kemiskinan

Terdapat beberapa faktor penyebab kemiskinan jika dipandang dari sisi ekonomi. *Pertama*, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. *Kedua*, perbedaan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia rendah, sehingga produktifitas dan upah juga rendah. *Ketiga*, kemiskinan disebabkan oleh perbedaan kesempatan untuk memperoleh modal. (Kuncoro, 2006)

Dari teori fungsi produksi kegiatan ekonomi terdapat hubungan yang menjelaskan tentang teori tentang permintaan tenaga kerja. dimana produksi menggambarkan proses dari input menjadi output produksi. Dalam menghasilkan produksi hanya menggunakan dua jenis input ialah tenaga kerja (L) serta modal (K), hingga fungsi produksinya adalah (Mankiw, 2003):

$$Q_t = f(L_t, K_t) \dots \dots \dots (1)$$

Untuk menentukan peyerapan tenaga kerja, dua input yang digunakan ialah kapital (K) serta tenaga kerja (L). Fungsi produksi menampilkan seberapa banyak jumlah paling tinggi dihasilkan suatu output jika sejumlah input tertentu digunakan.

2.7. Kebijakan Pemerintah dalam Pengentasan Kemiskinan

Terdapat beberapa kebijakan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, berupa program-program bantuan sebagai berikut:

2.7.1. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan atau PKH merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis. (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2020)

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, Program Keluarga Harapan (PKH) membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat

konstitusi dan Nawacita Presiden RI. Melalui PKH, kelompok masyarakat didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan *center of excellence* penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional. (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2020)

Misi besar PKH untuk menurunkan kemiskinan semakin mengemuka mengingat jumlah penduduk miskin Indonesia sampai pada Maret tahun 2016 masih sebesar 10,86 persen dari total penduduk atau 28,01 juta jiwa (BPS, 2016). Pemerintah telah menetapkan target penurunan kemiskinan menjadi 7-8 persen pada tahun 2019, sebagaimana tertuang di dalam RPJMN 2015-2019. PKH diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, menurunkan kesenjangan (*gini ratio*) seraya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa PKH memberikan dampak terhadap perubahan konsumsi rumah tangga, seperti di beberapa negara pelaksana CCT lainnya. PKH berhasil meningkatkan konsumsi rumah tangga penerima manfaat di Indonesia sebesar 4,8 persen.

- Pada PJP Tahun 2010 - 2014 terjadi peningkatan target *beneficiaries* dan alokasi budget PKH, melampaui *baseline* target perencanaan
- Pelaksanaan PKH tahun 2016 sebanyak 6 juta keluarga miskin dengan anggaran sebesar Rp. 10 Triliun
- Jumlah penerima PKH tahun 2017 sebanyak 6.228.810 keluarga dengan anggaran sebesar Rp. 11,5 Triliun
- Jumlah penerima PKH tahun 2018 sebanyak 10.000.232 KPM dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17,5 Triliun
- Target penerima PKH tahun 2019 sebanyak 10 juta KPM dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 32,65 Triliun

KPM PKH harus terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat. Kewajiban KPM PKH di bidang kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi serta timbang badan anak balita dan anak prasekolah.

Sedangkan kewajiban di bidang pendidikan adalah mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga PKH ke satuan pendidikan sesuai jenjang sekolah dasar dan menengah. Dan untuk komponen kesejahteraan sosial yaitu penyandang disabilitas dan lanjut usia mulai 60 tahun.

Bantuan sosial PKH pada Tahun 2019 terbagi menjadi dua jenis yaitu Bantuan Tetap dan Bantuan Komponen yang diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Bantuan Tetap untuk Setiap Keluarga

1. Reguler : Rp550.000,-/keluarga/tahun
2. PKH AKSES : Rp1.000.000,-/keluarga/tahun

B. Bantuan Komponen untuk Setiap Jiwa dalam Keluarga PKH

1. Ibu hamil : Rp2.400.000,-
2. Anak usia dini : Rp2.400.000,-
3. SD : Rp900.000,-
4. SMP : Rp1.500.000,-
5. SMA : Rp2.000.000,-
6. Disabilitas berat : Rp2.400.000,-
7. Lanjut usia : Rp2.400.000,-

Bantuan komponen diberikan maksimal untuk 4 jiwa dalam satu keluarga

2.7.2. BLT (Bantuan Langsung Tunai)

BLT atau Bantuan Langsung Tunai merupakan program bantuan pemerintah dengan pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat (*conditional cash transfer*) maupun tak bersyarat (*unconditional cash transfer*) untuk masyarakat miskin (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2020).

Mekanisme pelaksanaan bantuan sosial tersebut di Indonesia berupa pemberian kompensasi uang tunai, pangan, jaminan kesehatan, dan pendidikan dengan target pada tiga tingkatan: hampir miskin, miskin, sangat miskin. Selain itu, tujuan utama dari program ini adalah membantu masyarakat miskin untuk tetap memenuhi kebutuhan hariannya. Dalam pelaksanaan BLT ini, banyak yang menganggap sukses oleh beberapa kalangan, meski demikian kontroversi dan kritik masih berdatangan.

Di tengah pandemi covid 19 yang menyebabkan perekonomian mengalami penurunan, BLT ditujukan untuk warga miskin yang kehilangan pekerjaan. Bantuan sosial ini merupakan jaring pengaman sosial bagi masyarakat miskin maupun masyarakat yang paling terdampak secara sosial ekonomi akibat wabah covid 19. Terlebih, pemerintah juga akan memberikan BLT kepada masyarakat yang keluarganya mengalami sakit kronis. Penyaluran bantuan sosial dilakukan oleh PT Pos Indonesia, kecuali di wilayah Papua dan Papua Barat ada perlakuan khusus akibat kendala kondisi wilayah.

Kementerian Sosial menyalurkan program BLT tersebut kepada keluarga yang telah memenuhi persyaratan, dan terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Berikut ini persyaratan untuk mendapatkan BLT Kemensos Rp300 ribu tahun 2021, di antaranya:

1. Calon penerima adalah masyarakat yang masuk dalam pendataan RT/RW dan berada di desa.
2. Calon penerima adalah mereka yang kehilangan pekerjaan di tengah pandemi Covid-19.
3. Calon penerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial lain dari pemerintah pusat seperti Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, paket sembako, Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), hingga kartu prakerja.
4. Apabila calon penerima tidak mendapatkan bansos dari program lain, tetapi belum terdaftar oleh RT/RW, maka bisa langsung menginformasikannya ke aparat desa.
5. Jika calon penerima memenuhi syarat, tetapi tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), tetap bisa mendapatkan bansos tanpa harus membuat KTP terlebih dulu. Penerima mesti berdomisili di desa tersebut dan menulis alamat lengkapnya.
6. Apabila penerima sudah terdaftar dan datanya valid maka BLT Kemensos Rp300 ribu akan diberikan secara tunai dan nontunai.

Cara nontunai diberikan melalui transfer ke rekening bank penerima, sementara cara tunai akan diantarkan langsung oleh petugas pos ke rumah KPM, kolektif melalui aparat desa, bank milik negara, atau diambil langsung di kantor pos terdekat.

2.7.3.PIP (Program Indonesia Pintar)

Program Indonesia Pintar atau PIP adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang

berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). PIP merupakan kerja sama tiga kementerian yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Sosial (Kemensos), dan Kementerian Agama (Kemenag). PIP dirancang untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin/rentan miskin/prioritas tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, baik melalui jalur pendidikan formal (mulai SD/MI hingga anak Lulus SMA/SMK/MA) maupun pendidikan non formal (Paket A hingga Paket C serta kursus terstandar). Melalui program ini pemerintah berupaya mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah, dan diharapkan dapat menarik siswa putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikannya. PIP juga diharapkan dapat meringankan biaya personal pendidikan peserta didik, baik biaya langsung maupun tidak langsung.

Besaran Dana Manfaat PIP

1. Peserta didik SD/MI/Paket A mendapatkan Rp450.000,-/tahun;
2. Peserta didik SMP/MTs/Paket B mendapatkan Rp750.000,-/tahun;
3. Peserta didik SMA/SMK/MA/Paket C mendapatkan Rp1.000.000,-/tahun.

Detil jumlah untuk kelas akhir di setiap jenjang dapat dibaca di Petunjuk pelaksanaan PIP Kemendikbud Tahun 2016.

Kewajiban Peserta Didik Penerima Dana PIP

1. Menyimpan dan menjaga KIP dengan baik;
2. PIP merupakan bantuan pendidikan. Dana Manfaatnya harus digunakan untuk keperluan yang relevan;
3. Terus belajar dan bersekolah (tidak putus sekolah) dengan rajin, disiplin dan tekun.

Dana PIP dapat digunakan untuk membantu biaya pribadi peserta didik, seperti membeli perlengkapan sekolah/kursus, uang saku dan biaya transportasi, biaya praktik tambahan serta biaya uji kompetensi.

2.7.4.KKS (Kartu Keluarga Sejahtera)

Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) adalah kartu penanda bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) kurang mampu diantaranya penyandang disabilitas, lanjut usia yang belum memperoleh layanan/ bantuan sosial dan berada didalam panti/ Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), gelandangan dan pengemis yang tinggal dikolong jembatan serta tidak memiliki

tempat tinggal tetap atau tidak layak huni, korban penyalahgunaan napza dan bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2020).

2.7.4.1. Tujuan Layanan

1. Membantu PMKS miskin dalam memenuhi kebutuhan dasarnya
2. Mencegah menurunnya taraf kesejahteraan PMKS miskin dan rentan akibat kesulitan ekonomi
3. Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama

2.7.4.2. Manfaat Layanan

Bantuan KKS yang akan diterima PMKS setiap bulannya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Pada tahun anggaran 2015, bantuan KKS yang akan diberikan dalam waktu 3 bulan dengan total Rp. 600.000,-. Untuk selanjutnya pada tahun 2016 direncanakan akan diberikan Rp. 200.000,- setiap bulannya.

2.7.4.3. Kuota (Volume) Layanan Tahun 2015

Pada Tahun 2015 KKS akan diberikan kepada 340.000 PMKS kurang mampu (miskin) dalam panti/ LKS atau yang tinggal dikolong jembatan dan tidak memiliki hunian tetap atau tidak layak huni.

2.7.4.4. Kriteria

1. Usia 22 tahun keatas
2. Penyandang disabilitas yang tinggal di panti/ LKS
3. Lanjut usia yang tinggal di panti/ LKS
4. Gelandangan dan pengemis yang tinggal dipanti atau dibawah kolong jembatan dan tidak memiliki tempat tinggal tetap atau tidak layak huni
5. Korban penyalahgunaan napza yang tinggal di panti/ LKS
6. Bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan (BWBLP)

2.7.4.5. Syarat

1. Surat Keterangan dari RT / RW setempat yang menyatakan bahwa PMKS benar Penghuni Panti / LKS

2. Surat keterangan dari kantor Desa / Lurah yang menyatakan bahwa PMKS benar Penghuni Panti/ LKS
3. Surat keterangan dari dinas social setempat yang menerangkan bahwa gelandangan dan pengemis tersebut berada di wilayah domisili dinas social tersebut
4. Kartu Keluarga / Kartu Tanda Penduduk (KTP)
5. Pas Foto
6. Foto Tubuh

2.7.4.6.Tahapan Layanan

1. Sponsor (LKS / Yayasan / Panti Asuhan / Ponpes / perorangan) mendaftarkan diri melalui portal intelresos.kemsos.go.id sampai mendapat verifikasi email dari intelresos. Yang menandakan bahwa akun Sponsor telah aktif.
2. Setelah akun sponsor telah aktif, maka Sponsor wajib menginput data PMKS yang sesuai kriteria pada portal rehsos.kemsos.go.id sesuai dengan format yang diberikan secara lengkap untuk diajukan menjadi penerima Kartu Keluarga Sejahtera.
3. Dinas Sosial Provinsi dan/atau Dinas Sosial Kabupaten Kota melakukan verifikasi terhadap LKS yang mendaftar berdasarkan Kelengkapan berkas LKS yang diupload seperti Scan Foto Lembaga, Scan Surat Rekomendasi, dan berkas lainnya melalui intelresos.kemsos.go.id.
4. Dinas Sosial dan Provinsi melakukan verifikasi terhadap PMKS yang didaftarkan secara online oleh sponsor (LKS / Yayasan / Panti Asuhan / Ponpes) berdasarkan dokumen yang diupload oleh sponsor seperti Surat keterangan RT / RW/Lurah, Akta Lahir, Kartu Siswa, dan sebagainya melalui intelresos.kemsos.go.id.
5. Hasil verifikasi *online* yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi dan/atau Dinas Sosial Kabupaten Kota melalui intelresos.kemsos.go.id kemudian di verifikasi dan matching data dengan (a) hasil pendataan Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan (b) hasil verifikasi validasi pemerintah daerah secara manual (*offline*).
6. Hasil verifikasi dan matching data tersebut kemudian ditetapkan sebagai daftar PMKS penerima Kartu Keluarga Sejahtera melalui Surat Keputusan Menteri Sosial.
7. Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial menyerahkan Surat Keputusan Menteri Sosial dilampirkan dengan Data PMKS Calon Penerima Kartu Keluarga Sejahtera

kepada Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial cq Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial.

8. Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial menyerahkan Surat Keputusan Menteri Sosial tentang Penetapan PMKS penerima Kartu Keluarga Sejahtera kepada Mitra Percetakan Kartu keluarga Sejahtera dan PT Pos Indonesia.
9. Hasil Kartu keluarga Sejahtera yang dicetak diserahkan kepada Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial untuk diverifikasi sesuai dengan jumlah yang tertera pada Surat keputusan Menteri Sosial dengan disertai Berita Acara Serah Terima Kartu Keluarga Sejahtera.
10. Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial menyerahkan Kartu Keluarga Sejahtera yang didaftarkan melalui pendaftaran online kepada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial cq. Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.
11. Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial , mengirimkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kepada Dinas Sosial Provinsi untuk Didistribusikan kepada Sponsor PMKS.

2.7.4.7. Pihak Yang Terlibat (*Stakeholder*)

1. Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan kebudayaan
2. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI
3. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI
4. Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI

2.7.5. BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai).

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat atau disebut KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di *e-Warong* KUBE PKH/pedagang bahan pangan yang bekerjasama dengan Bank HIMBARA. Bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran serta memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM secara tepat sasaran dan tepat waktu (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2020).

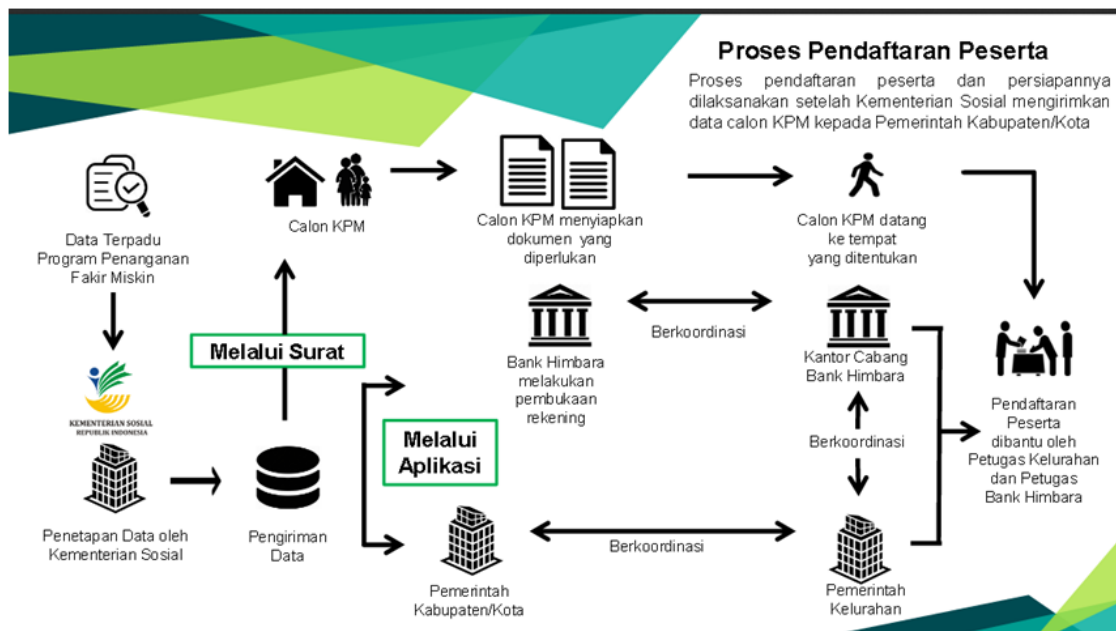
2.7.5.1. Tujuan

1. Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan
2. Memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM
3. Meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan Bantuan Pangan bagi KPM
4. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan
5. Mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*)

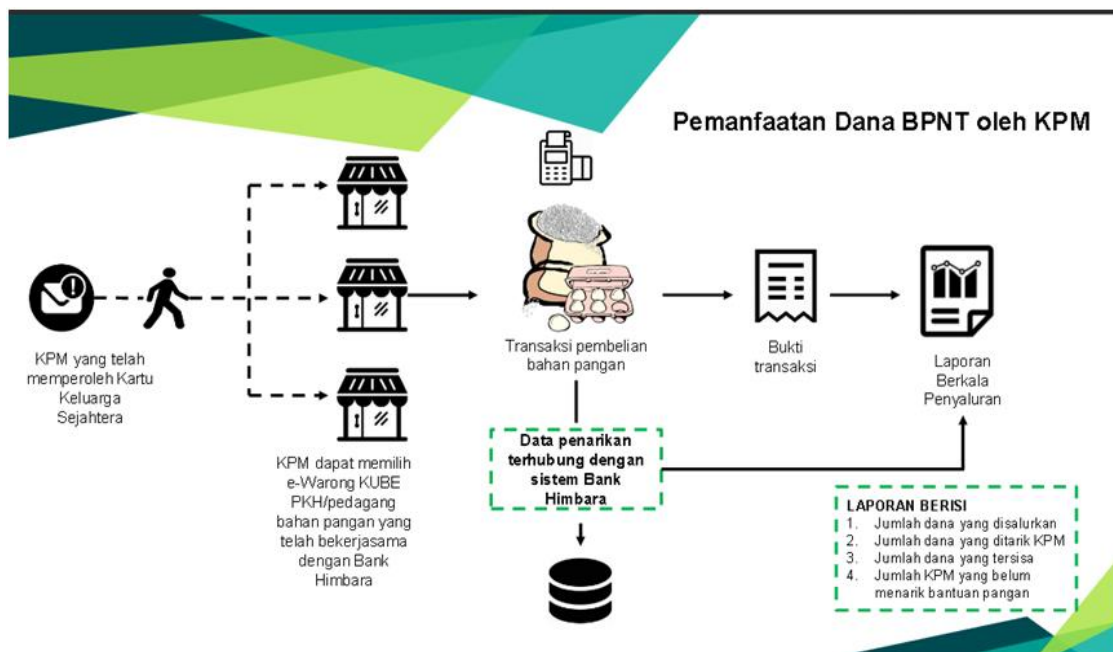
2.7.5.2. Proses Pendaftaran Peserta

Gambar 2.3 Proses Pendaftaran Peserta BPNT

Sumber: Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2020



2.7.5.3. Pemanfaatan Dana BPNT Oleh KPM



Gambar 2.4 Pemanfaatan Dana BPNT oleh KPM

Sumber: Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2020

1. Manfaat

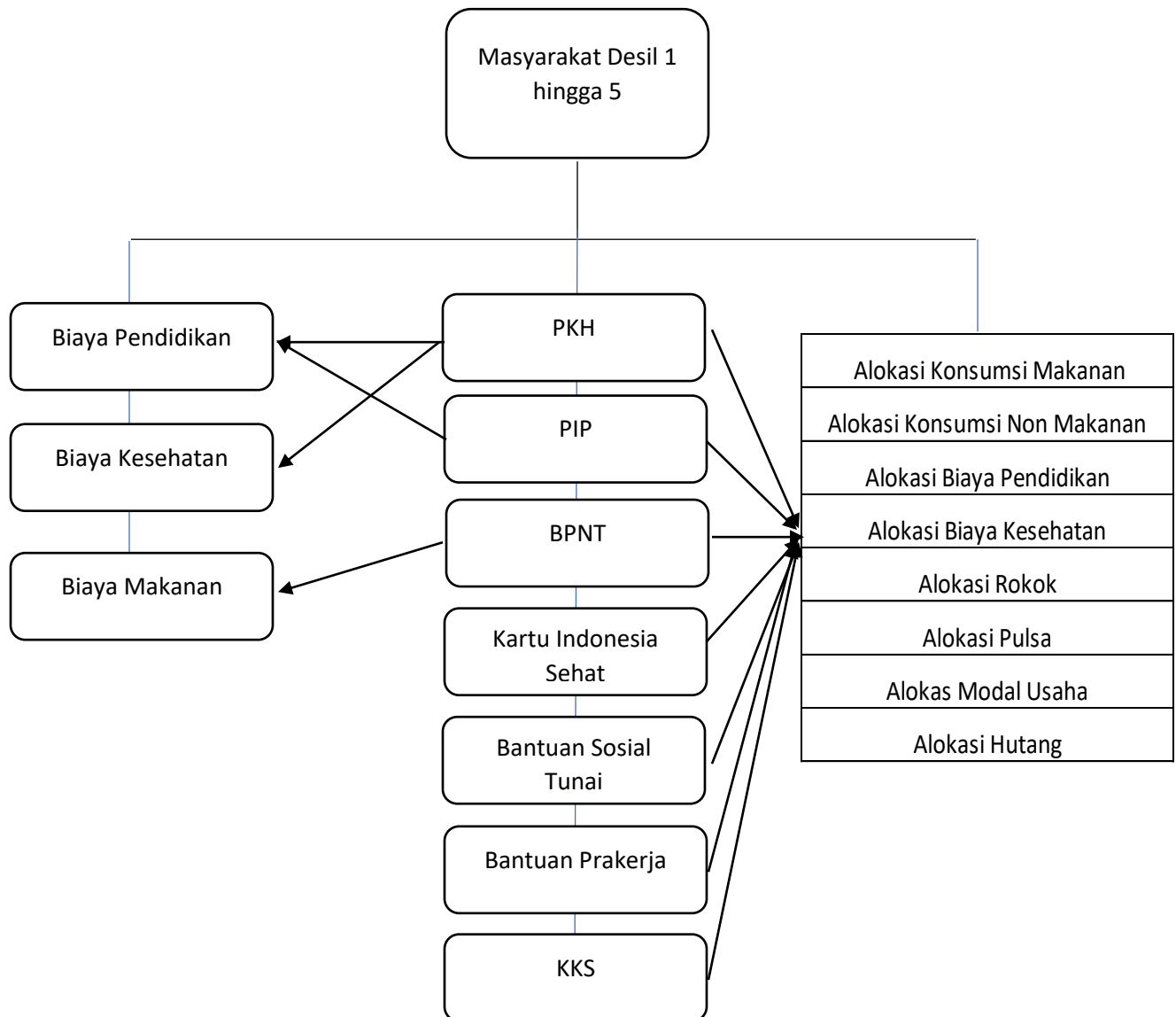
1. Meningkatnya ketahanan pangan ditingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
2. Meningkatnya transaksi non tunai dalam agenda GNNT.
3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan sehingga meningkatkan kemampuan ekonomi yang sejalan dengan SNKI.
4. Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial.
5. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil dibidang perdagangan.

2.7.5.5.Prinsip Umum BPNT

1. Mudah dijangkau dan digunakan oleh KPM
2. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM tentang kapan, berapa, jenis dan kualitas bahan pangan dengan preferensi
3. Mendorong usaha eceran rakyat untuk melayani KPM
4. Memberikan akses jasa keuangan kepada KPM

2.8.Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran melakukan pemetaan terhadap pola perilaku konsumsi masyarakat yang berada pada desil 1 hingga desil 5. Adapun beberapa konsumsi yang hendak diidentifikasi akan mempengaruhi penduduk dalam meningkatkan kesejahteraannya. Analisis Efektivitas bantuan sosial yang disalurkan pemerintah terhadap masyarakat miskin juga dapat terlihat dari penggunaan bantuan pemerintah terhadap masyarakat. Berikut kerangka berpikir pada kajian ini.



Gambar 2.5 Kerangka Berfikir

Sumber: diolah dari DTKS, 2021

Gambar tersebut menjelaskan bahwa ada 3 skema bantuan yang akan di ujikan. Skema PKH akan diuji pengaruhnya terhadap pengeluaran pada biaya pendidikan dan kesehatan, sedangkan Program Indonesia Pintar (PIP) diuji pengaruhnya terhadap biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh masyarakat. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) akan diujikan pengaruhnya terhadap pengeluaran terhadap konsumsi makanan. Selain itu dilakukan pengujian pengaruh keseluruhan jenis skema terhadap delapan alokasi konsumsi masyarakat di Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Bangka.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dan primer. Lingkup penelitian akan mencakup dua Kabupaten dengan jumlah rumah tangga penerima bantuan pada desil 1 tertinggi dan terendah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tujuan dari penelitian ini adalah membuat deskripsi, gambaran atau potret secara sistematis serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Analisis deskriptif adalah penjelasan yang tidak menyimpulkan hasil penelitian namun lebih menekankan kepada menjelaskan data dan subjek penelitian dengan penyajian data secara sistematis (Sulistyo, 2012). Ghozali (2016) mengatakan bahwa statistik deskriptif merupakan analisis data dengan melihat dari hasil data statistik.

Menurut Winartha (2006), metode analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi dilapangan. Metode analisis deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek dengan tujuan membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang diselidiki. Adapun jenis-jenis analisis deskriptif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: (Safuridar & Suci, 2017)

1. Kriteria kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS)
2. Alokasi bantuan sosial untuk konsumsi
3. Dampak bantuan program penanggulangan kemiskinan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan survei dan wawancara. Survei akan dilakukan pada setiap kecamatan yang ada pada wilayah kabupaten dengan rumah tangga desil 1 tertinggi dan terendah.

3.2.Lokasi Penelitian

Cakupan wilayah penelitian ini adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam lingkup kajian, penelitian ini memiliki cakupan provinsi ketika analisis data kemiskinan pada Data

Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun pada pendalaman materi mengenai kemiskinan, akan dilakukan survei terhadap efektivitas kebijakan pemerintah dalam kegiatan pengentasan kemiskinan di wilayah 2 kabupaten dengan jumlah rumah tangga penerima bantuan pada desil 1 tertinggi dan terendah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berikut adalah pemetaan responden di 2 kabupaten lokasi penelitian:

Tabel 3.1 Pemetaan Responden Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Bangka

No.	Kecamatan (Kabupaten Bangka Selatan)	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Kecamatan (Kabupaten Bangka)	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Desil 5
1	Air Gegas	4	14	3	9	Mendo Barat	4	5	7	2	8
2	Toboali	8	9	9	9	Sungailiat	2		2	23	9
3	Tukak Sadai	9	9	9	9	Belinyu	10	10	9	3	5
	Total	21	32	21	27	Total	16	15	18	28	22

Sumber : hasil survey, 2021

3.3. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini melakukan identifikasi terhadap indikator ekonomi yaitu kemiskinan. Data kemiskinan akan dikaji dengan memanfaatkan data sekunder yang disediakan oleh Dinas Sosial serta data survei level rumah tangga yang dilakukan secara mandiri di lokasi kabupaten yang memiliki tingkat penerima dana bantuan tertinggi dan terendah pada desil 1 dan desil 5 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam melakukan identifikasi terhadap tingkat kemiskinan adalah data kuantitatif yang disediakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sumber data dalam kajian ini adalah data primer dan data sekunder, di mana data ini didapat melalui survei dan wawancara, dokumen yang diperoleh langsung dari Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta BPS dan responden (masyarakat) dilokasi kajian yang telah ditentukan.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam kajian ini adalah data primer dan sekunder dimana untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Survei lapangan untuk mengumpulkan data primer dimana data yang diperoleh langsung dari hasil survei dan interview yang diperoleh dari narasumber yang telah ditentukan yang dianggap kredibel dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan.
- b. Studi kepustakaan sebagai Langkah pendokumentasian data sekunder untuk mendalami hasil analisis data primer yang didapat dari literatur dan dokumen. Adapun data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah data yang telah diterbitkan oleh instansi-instansi terkait seperti, Badan Pusat Statistik, Dinas Sosial.

3.6. Teknik Analisis Data

Terdapat beberapa Teknik analisis yang bisa diterapkan untuk memberikan informasi efektivitas bantuan sosial dalam mengatasi permasalahan kemiskinan dan pengangguran di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Beberapa metode yang akan dilakukan pada kajian menggunakan regresi linier berganda.

Regresi linier berganda adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab-akibat antara variabel dengan variabel lainnya. Dalam analisis regresi sederhana, hubungan antara variabel bersifat linier, di mana perubahan pada *variabel independent* akan diikuti oleh perubahan pada variabel secara tetap. Regresi memungkinkan kita untuk melakukan analisis terhadap hubungan antar suatu variabel dengan variabel lainnya. Penelitian ini akan melakukan deteksi mengenai beberapa faktor yang bisa mempengaruhi pola belanja rumah tangga sebagai dampak dari penerimaan bantuan pemerintah.

Data sekunder dan data primer dapat dianalisis menggunakan metode regresi terhadap data *Cross Section*. Dalam melihat pengaruh tambahan pendapatan setelah disalurkan bantuan sosial pada level individu (responden) maka terdapat beberapa faktor personal yang bisa diulas seperti tingkat tambahan pengeluaran pada komponen makanan, Pendidikan, Belanja Rokok, dan lain lain. Sehingga pemodelan empiris dari kajian ini diformulasikan sebagai berikut:

- (1) $FoodCons_i = \beta_0 + \beta_1 Bansos_1 + \beta_2 X_2 + e_i$
- (2) $GoodCons_i = \beta_0 + \beta_1 Bansos_1 + \beta_2 X_2 + e_i$
- (3) $EducCons_i = \beta_0 + \beta_1 Bansos_1 + \beta_2 X_2 + e_i$
- (4) $HealthCons_i = \beta_0 + \beta_1 Bansos_1 + \beta_2 X_2 + e_i$
- (5) $SmokeHabbit_i = \beta_0 + \beta_1 Bansos_1 + \beta_2 X_2 + e_i$
- (6) $Utylity Credit Cons_i = \beta_0 + \beta_1 Bansos_1 + \beta_2 X_2 + e_i$
- (7) $Investment_i = \beta_0 + \beta_1 Bansos_1 + \beta_2 X_2 + e_i$
- (8) $DebtExpenditure_i = \beta_0 + \beta_1 Bansos_1 + \beta_2 X_2 + e_i$
- (9) $EducCons_i = \beta_0 + \beta_1 PKH_1 + \beta_2 X_2 + e_i$
- (10) $healthCons_i = \beta_0 + \beta_1 PKH_1 + \beta_2 X_2 + e_i$
- (11) $EducCons_i = \beta_0 + \beta_1 PIP_1 + \beta_2 X_2 + e_i$
- (12) $FoodCons_i = \beta_0 + \beta_1 BPNT_1 + \beta_2 X_2 + e_i$

Keterangan :

$FoodCons_i$	= Konsumsi Makanan
$GoodCons_i$	= Konsumsi Non-Makanan
$EducCons_i$	= Biaya Pendidikan
$HealthCons_i$	= Biaya Kesehatan
$Utylity Credit Cons_i$	= Pengeluaran Pulsa
$SmokeHabbit_i$	= Pengeluaran Rokok
$Investment_i$	= Modal Usaha
$DebtExpenditure_i$	= Hutang
$BPNT$	= Bantuan Pangan Non Tunai
PIP_1	= Program Indonesia Pintar
PKH_1	= Program Keluarga Harapan
$Bansos_1$	= Total Bantuan Sosial (Komposit)

Regresi bisa dilakukan pada berbagai struktur data seperti data *time series*, panel dan *cross section*. Khusus data regresi pada kajian ini dilakukan menggunakan data *cross section*.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Bangka

Wilayah Kabupaten Bangka terletak di Pulau Bangka dengan luas kurang lebih 316.779 Ha atau 3.167,79 Km². Secara Administratif Wilayah Kabupaten Bangka berbatasan langsung dengan daerah wilayah Kabupaten/ Kota lainnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu dengan wilayah Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Barat.

Kabupaten Bangka Terbagi menjadi 8 Kecamatan antara lain Kecamatan Mendo Barat, Merawang, Puding Besar, Sungailiat, Pemali, Bakam, Belinyu dan Riau Silip. Dari seluruh Kecamatan Tersebut Kecamatan Mendo Barat merupakan wilayah terluas yaitu sebesar 19,33 persen dari total luas wilayah Kabupaten Bangka sedangkan Kecamatan dengan wilayah terkecil adalah Kecamatan Pemali dengan luas 4,33 persen.

Populasi penduduk Kabupaten Bangka tahun 2020 sebanyak 326.265 jiwa yang didominasi oleh penduduk laki-laki sebanyak 168.526 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 157.379 jiwa. Berdasarkan piramida penduduk komposisi penduduk Kabupaten Bangka didominasi oleh penduduk usia muda.

4.1.2. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Bangka Selatan

Kabupaten Bangka Selatan merupakan wilayah terluas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan luas daratan mencapai 3.607,08 Km². Terdapat 8 Kecamatan di Kabupaten Bangka Selatan yaitu Kecamatan Payung, Air Gegas, Kepulauan Pongok, Lepar Pongok, Tukak Sadai, Toboali, Pulau Besar, dan Simpang Rimba. Kecamatan Toboali merupakan Kecamatan dengan luas wilayah terbesar mencapai 1.460,34 Km atau sekitar 40,49 persen dari luas Kabupaten Bangka Selatan, sementara kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Pulau Pongok, dengan persentase luas wilayah sebesar 2,49 persen.

Jumlah Penduduk Bangka Selatan tahun 2020 sebanyak 198.189 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 102.447 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 95.742 jiwa. Berdasarkan piramida penduduk sebagian besar penduduk Kabupaten Bangka Selatan

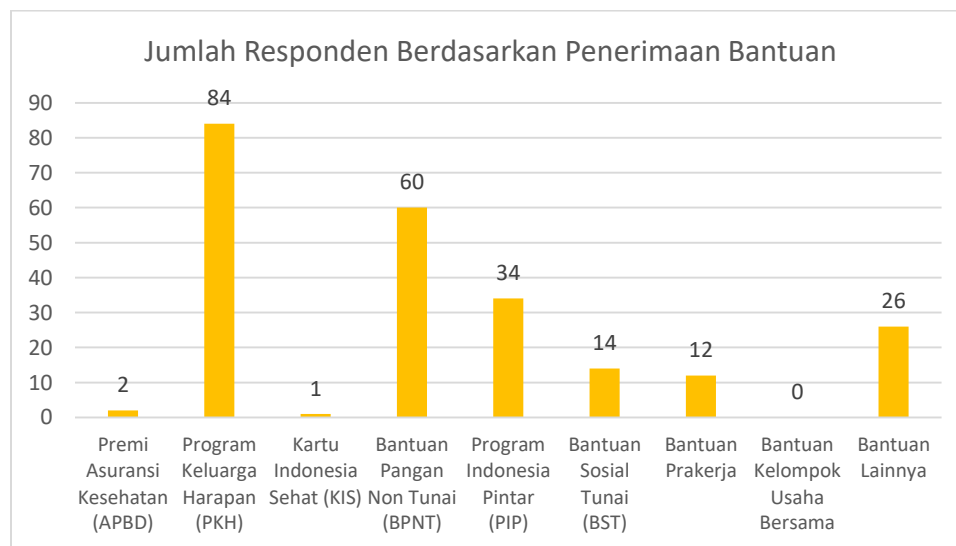
berada di usia muda. Persentase pekerja berdasarkan lapangan usaha utama menunjukkan di Kabupaten Bangka Selatan tertinggi pada lapangan usaha pertanian dengan persentase 47,90 persen sedangkan lapangan usaha terendah yaitu lapangan usaha jasa dengan persentase 21,26 persen.

4.2 Karakteristik Responden

Karakteristik responden pada kajian ini terdiri dari (1) Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Bantuan; (2) Umur; (3) Status Pernikahan; (4) Pendidikan; (5) Status Rumah; (6) Jenis Pekerjaan; (7) Pendapatan ; (8) Karakteristik Pola Konsumsi dengan uraian sebagai berikut:

4.2.1 Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Bantuan yang Diterima

Jumlah responden berdasarkan jenis bantuan yang diterima di Kabupaten Bangka dan Bangka Selatan dapat dilihat pada Gambar 4.1. berikut:



Gambar 4.1 Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Bantuan yang Diterima

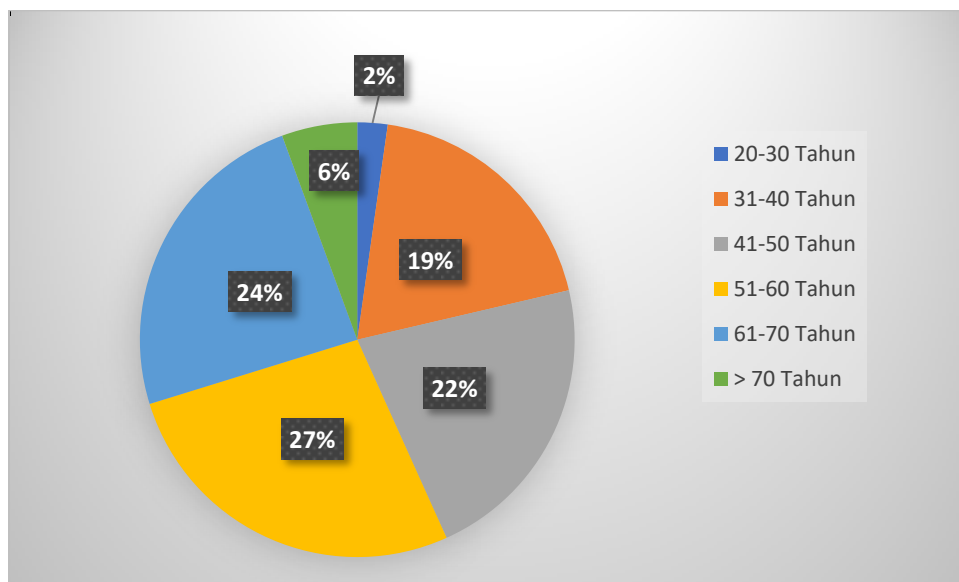
Sumber : hasil survey, 2021

Gambar 4.1 menunjukkan bahwa jumlah responden penerima bantuan di Kabupaten Bangka dan Bangka Selatan terdiri dari jenis bantuan yang diterima : (1) Premi Asuransi Kesehatan (APBD); (2) Program Keluarga Harapan (PKH); (3) Kartu Indonesia Sehat (KIS); (4) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT); (5) Program Indonesia Pintar (PIP); (6) Bantuan Sosial Tunai (BST); (7) Bantuan Prakerja; (8) Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE); (9) Bantuan Lainnya seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Usaha Mikro Kecil Menengah

(UMKM), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Bantuan PKH sejumlah 84 responden, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sejumlah 60 responden, Kartu Indonesia Pintar sejumlah 34 responden dan bantuan lainnya seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai), UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), KKS (Kartu Keluarga Sejahtera), dan BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) sejumlah 26 responden. Sementara responden yang menerima bantuan KUBE, Kartu Indonesia Sehat dan Premi Asuransi Kesehatan (APBD) sebanyak 3 responden. Berdasarkan data diketahui bahwa 3 skema terbesar bantuan yang diterima oleh keseluruhan responden terbanyak adalah PKH, BPNT dan PIP.

4.2.2 Umur Responden di Kabupaten Bangka dan Bangka Selatan

Umur responden di Kabupaten Bangka dan Bangka Selatan dapat dilihat pada Gambar 4.2. berikut:



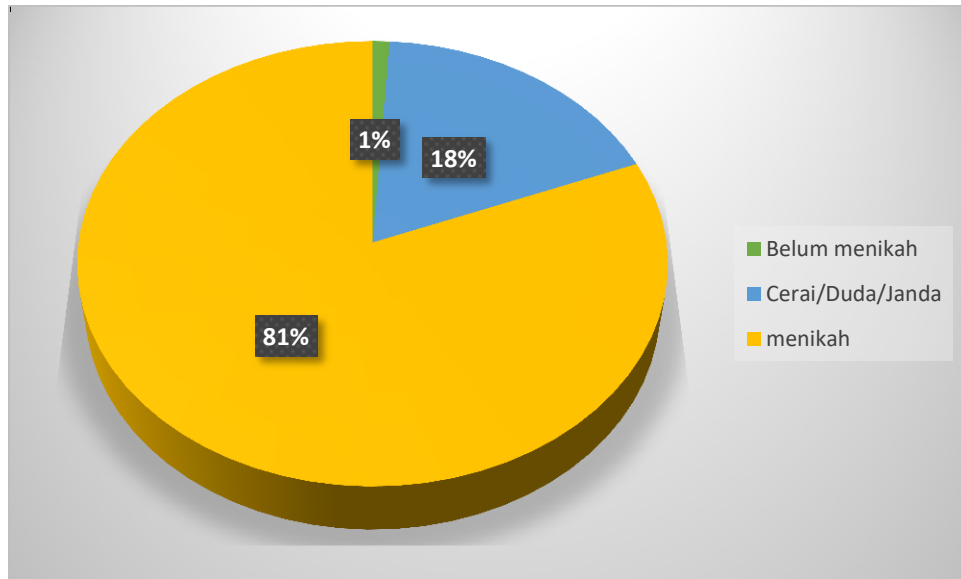
Gambar 4.2 Umur Responden Kabupaten Bangka dan Bangka Selatan

Sumber : hasil survey, 2021

Berdasarkan Gambar 4.2 menunjukkan bahwa umur responden berkisar antara 20-80 tahun, responden yang berumur 20-30 tahun sebesar 2 persen, umur 31-40 tahun 19 persen, umur 41-50 tahun sebesar 22 persen, umur 51-60 tahun sebesar 27 persen, umur 61-70 tahun sebesar 24 persen dan yang berumur >70 tahun sebesar 6 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden berusia produktif.

4.2.3 Status Pernikahan Responden di Kabupaten Bangka dan Bangka Selatan

Status pernikahan responden di Kabupaten Bangka dan Bangka Selatan dapat dilihat pada Gambar 4.3. berikut:



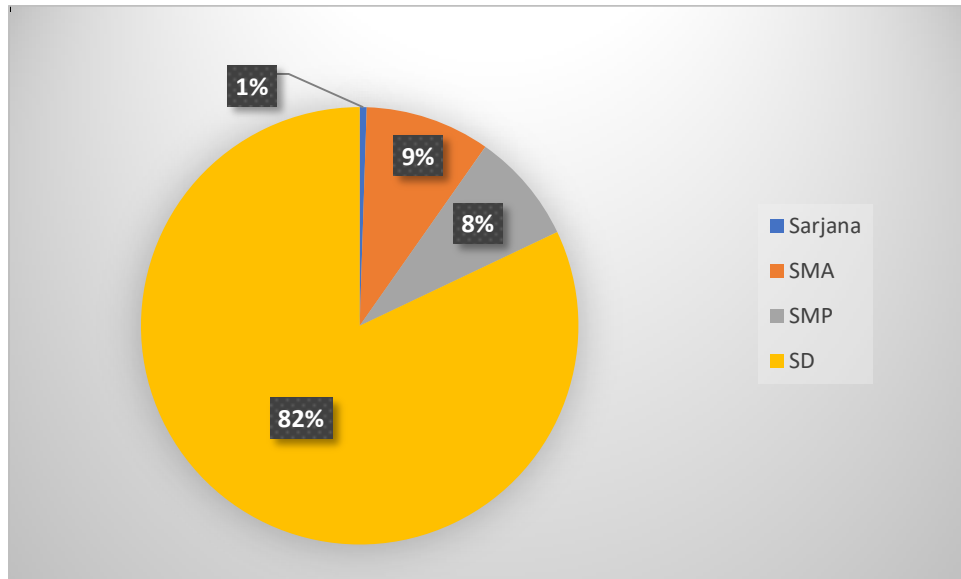
Gambar 4.3 Status Pernikahan Responden Kabupaten Bangka dan Bangka Selatan

Sumber : hasil survey, 2021

Berdasarkan Gambar 4.3 status pernikahan responden terdiri dari : (1) menikah; (2) belum menikah; (3) Cerai atau Duda/ Janda. Responden yang berstatus menikah sebesar 81 persen, belum menikah sebesar 1 persen, dan yang berstatus cerai atau duda/ janda sebesar 18 persen.

4.2.4 Pendidikan Responden di Kabupaten Bangka dan Bangka Selatan

Pendidikan responden di Kabupaten Bangka dan Bangka Selatan dapat dilihat pada Gambar 4.4. berikut:



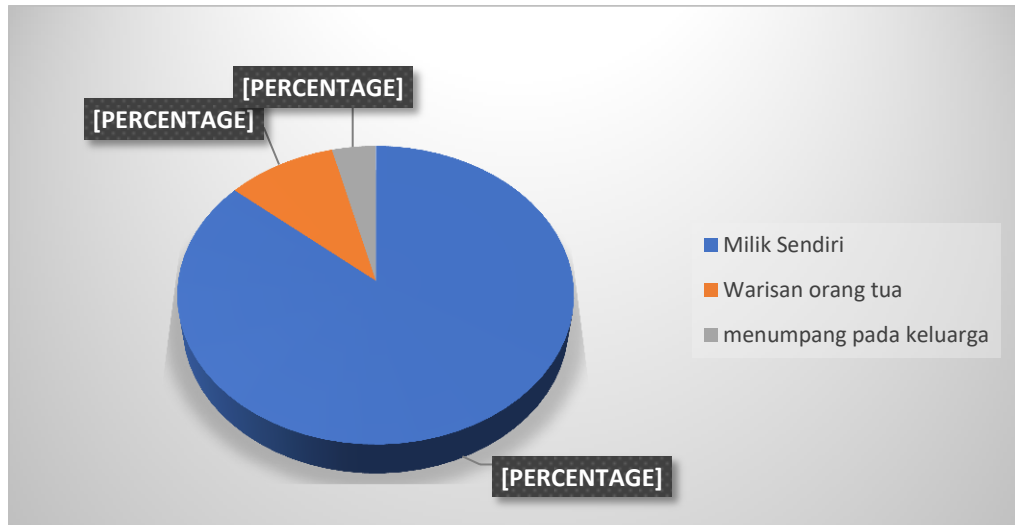
Gambar 4.4 Pendidikan Responden di Kabupaten Bangka dan Bangka Selatan

Sumber : hasil survey, 2021

Berdasarkan Gambar 4.4 pendidikan responden terdiri dari : (1) Sekolah Dasar (SD); (2) Sekolah Menengah Pertama (SMP); (3) Sekolah Menengah Akhir (SMA); Dan (4) Sarjana. Responden yang pendidikan terakhir SD sebesar 82 persen, SMP sebesar 8 persen, SMA 9 persen, dan pendidikan terakhirnya sarjana sebesar 1 persen.

4.2.5 Status Kepemilikan Rumah Responden di Kabupaten Bangka

Status kepemilikan rumah responden yang terdapat di Kabupaten Bangka dapat dilihat pada Gambar 4.5. berikut:



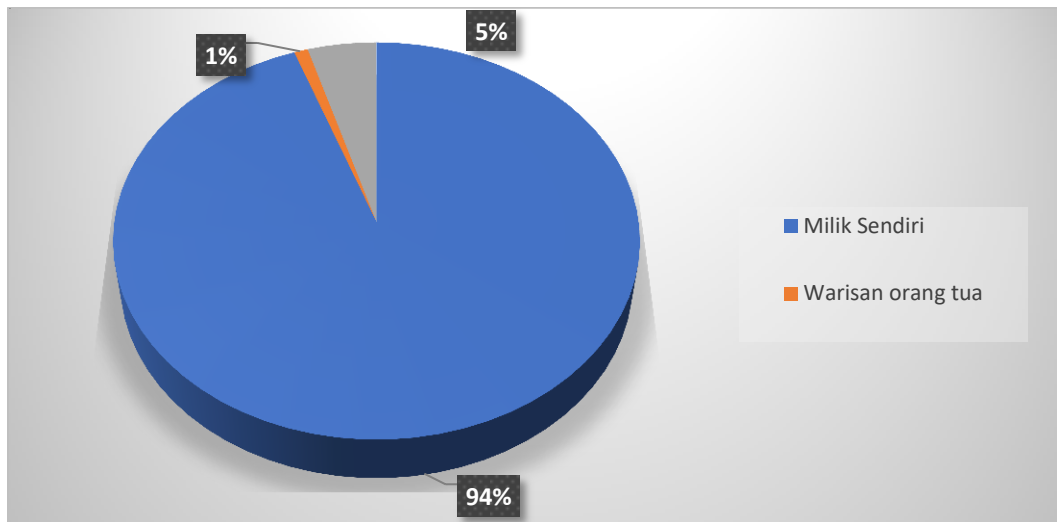
Gambar 4.5 Status Kepemilikan Rumah Responden di Kabupaten Bangka

Sumber : hasil survey, 2021

Berdasarkan Gambar 4.5 diketahui bahwa status kepemilikan rumah responden di Kabupaten Bangka terbanyak adalah milik sendiri sebesar 86 persen. Sementara responden yang tinggal dengan warisan orang tua sebesar 10 persen dan responden yang menumpang pada keluarga sebesar 4 persen. Hal ini menunjukkan bahwa responden tidak lagi dihadapi dalam pemenuhan tempat tinggal, karena lebih dari 80 persen telah menempati rumah sendiri.

4.2.6 Status Kepemilikan Rumah Responden di Kabupaten Bangka Selatan

Status kepemilikan rumah responden di Kabupaten Bangka Selatan dapat dilihat pada Gambar 4.6.



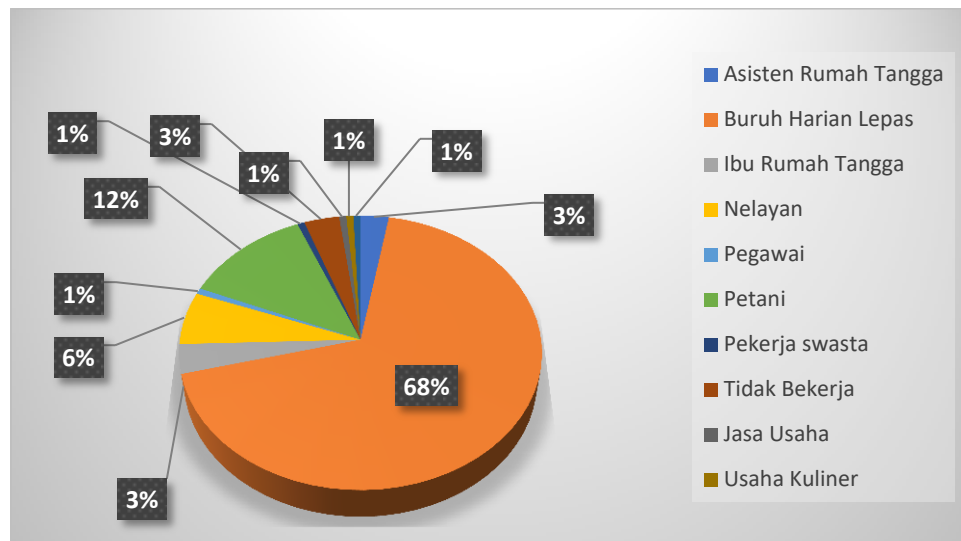
Gambar 4.6 Status Kepemilikan Rumah Responden di Kabupaten Bangka Selatan

Sumber : hasil survey, 2021

Berdasarkan Gambar 4.6 menunjukkan bahwa status kepemilikan rumah responden di Kabupaten Bangka Selatan terbanyak adalah milik sendiri sebesar 94 persen. Sementara responden yang tinggal dengan warisan orang tua sebesar 1 persen dan responden yang menumpang pada keluarga sebesar 5 persen. Hal ini menunjukkan bahwa responden tidak lagi dihadapi dalam pemenuhan tempat tinggal, karena lebih dari 90 persen telah menempati rumah sendiri.

4.2.7 Jenis Pekerjaan Responden di Kabupaten Bangka

Gambaran jenis pekerjaan responden Kabupaten Bangka dapat dilihat pada Gambar 4.7.



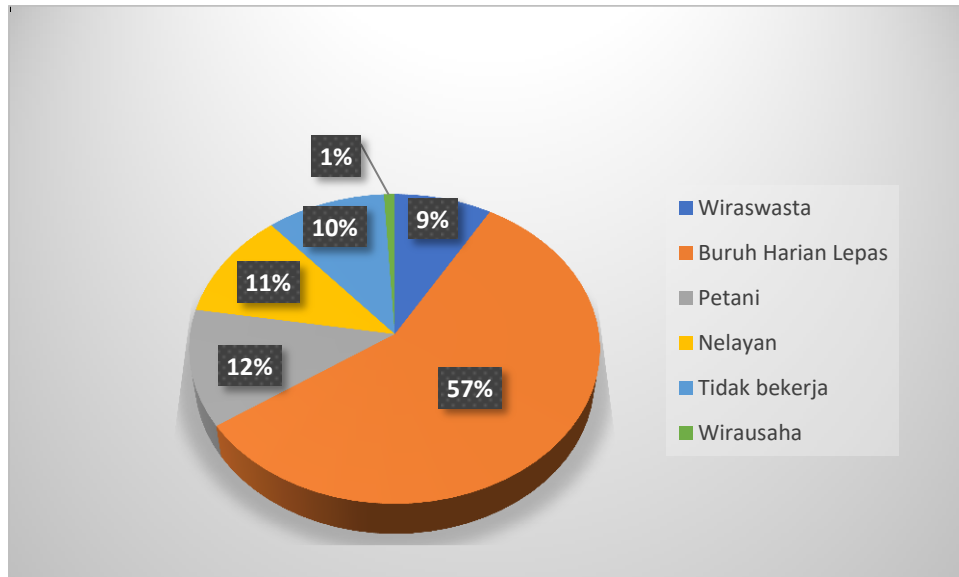
Gambar 4.7 Jenis Pekerjaan Responden Kabupaten Bangka

Sumber : hasil survey, 2021

Berdasarkan Gambar 4.7 menunjukkan bahwa jenis pekerjaan responden Kabupaten Bangka didominasi oleh Buruh Harian Lepas yaitu sebesar 68 persen dan petani sebesar 12 persen. Sedangkan responden pada kategori jasa usaha, pekerja swasta, dan pegawai merupakan pekerjaan dengan persentase terendah, masing-masing sebesar 1 persen. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat di Kabupaten Bangka sebagian besar bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dan Petani. Dengan kondisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa responden tersebut tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulannya.

4.2.8 Jenis Pekerjaan Responden Kabupaten di Bangka Selatan

Gambaran jenis pekerjaan responden di Kabupaten Bangka Selatan dapat dilihat pada Gambar 4.8.



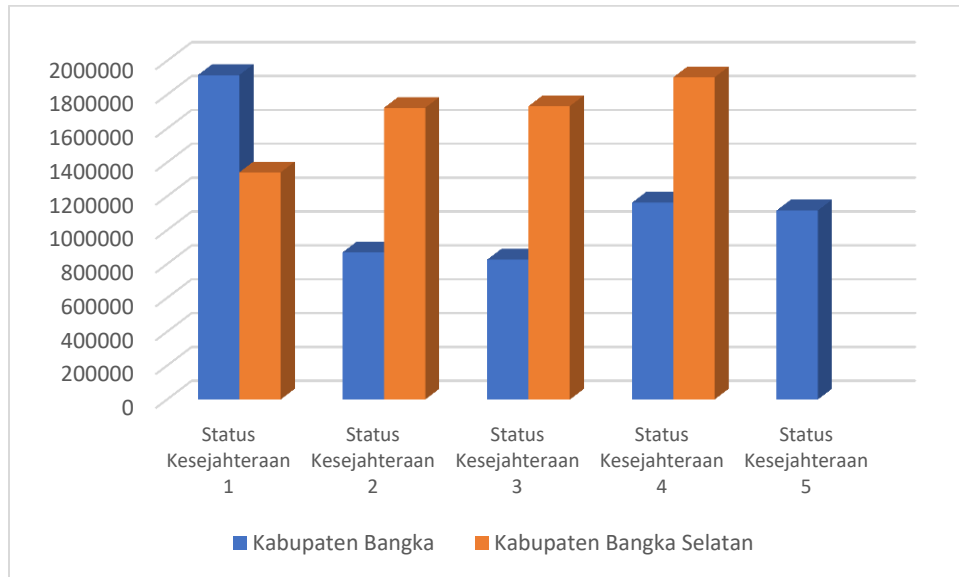
Gambar 4.8 Jenis Pekerjaan Responden Kabupaten di Bangka Selatan

Sumber : hasil survey, 2021

Berdasarkan Gambar 4.8 menunjukkan bahwa jenis pekerjaan responden di Kabupaten Bangka Selatan didominasi oleh Buruh Harian Lepas yaitu sebesar 57 persen, petani sebesar 12 persen dan nelayan sebesar 11 persen. Sedangkan responden yang tidak bekerja sebesar 10 persen, hal ini dikarenakan responden yang tidak bekerja merupakan penduduk yang berstatus janda dan cerai mati. Kategori wiraswasta dan wirausaha merupakan pekerjaan dengan persentase terendah, masing-masing sebesar 9 persen dan 1 persen. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat di Kabupaten Bangka Selatan sebagian besar bekerja sebagai Buruh Harian Lepas, petani dan nelayan. Dengan kondisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa responden tersebut tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulannya.

4.2.9 Pendapatan Responden Kabupaten Bangka dan Bangka Selatan

Gambaran pendapatan responden Kabupaten Bangka dan Bangka Selatan dapat dilihat pada Gambar 4.9.



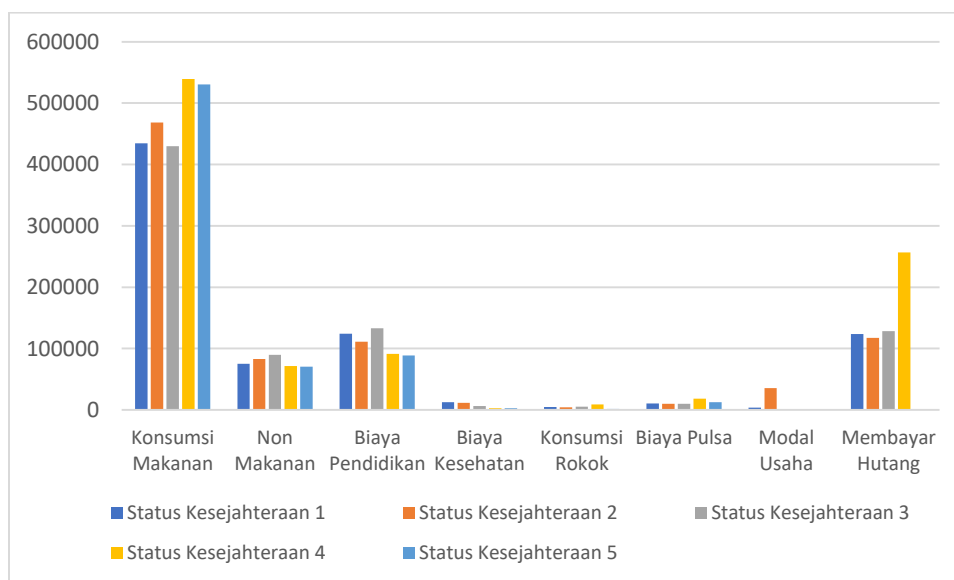
Gambar 4.9 Pendapatan Responden Kabupaten Bangka dan Bangka Selatan

Sumber : hasil survey, 2021

Berdasarkan Gambar 4.9 menunjukkan bahwa pada status kesejahteraan 1 pendapatan responden Kabupaten Bangka lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan responden Kabupaten Bangka Selatan. Sedangkan pada status kesejahteraan 2,3, dan 4 pendapatan responden Kabupaten Bangka Selatan lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan responden Kabupaten Bangka. Serta status kesejahteraan 5 untuk pendapatan responden hanya ada di Kabupaten Bangka.

4.2.10 Karakteristik Pola Konsumsi Responden di Kabupaten Bangka

Gambaran pola konsumsi responden Kabupaten Bangka dapat dilihat pada Gambar 4.10.



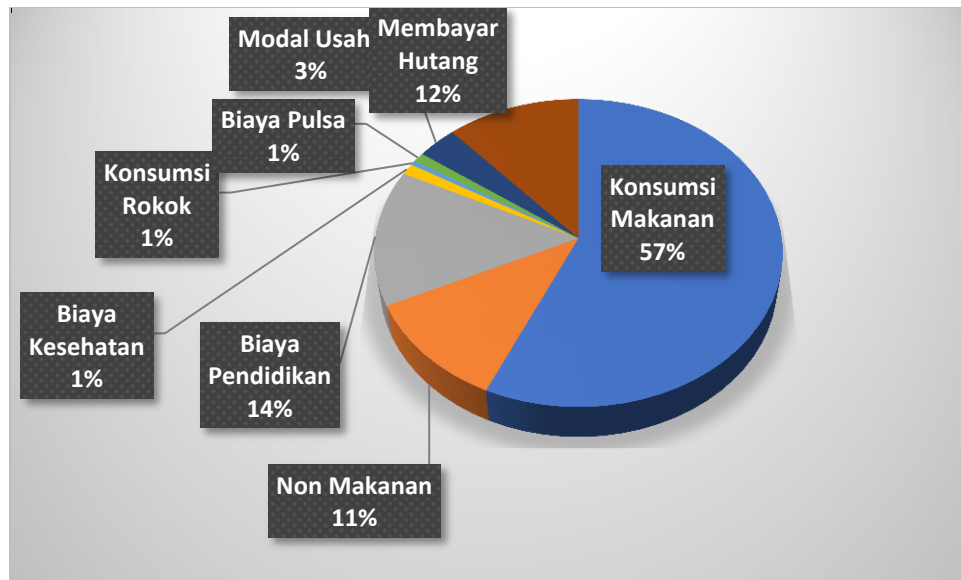
Gambar 4.10 Karakteristik Pola Konsumsi Respoden Kabupaten Bangka

Sumber : hasil survey, 2021

Gambar 4.10 menunjukkan bahwa gambaran pola konsumsi responden dari bantuan yang diterima Kabupaten Bangka terbanyak digunakan untuk makanan, non makanan, biaya pendidikan dan membayar hutang. Sedangkan pola konsumsi dari bantuan yang diterima terhadap biaya kesehatan, konsumsi rokok, biaya pulsa dan modal usaha masih rendah.

Pola konsumsi responden pada makanan berdasarkan status kesejahteraan menunjukkan bahwa responden dengan status kesejahteraan 4 dan 5 paling tinggi dibandingkan responden dengan status kesejahteraan 1, 2, dan 3. Non makanan dan biaya pendidikan paling besar didominasi oleh responden dengan status kesejahteraan 3. Sedangkan bantuan yang diterima terhadap biaya kesehatan, konsumsi rokok, biaya pulsa, dan modal usaha masih sedikit digunakan. Namun pola konsumsi responden dalam membayar hutang didominasi oleh status kesejahteraan 4.

Dilakukan penelusuran lebih lanjut mengenai karakteristik pola konsumsi masyarakat secara rata-rata maka terlihat dari grafik berikut ini:



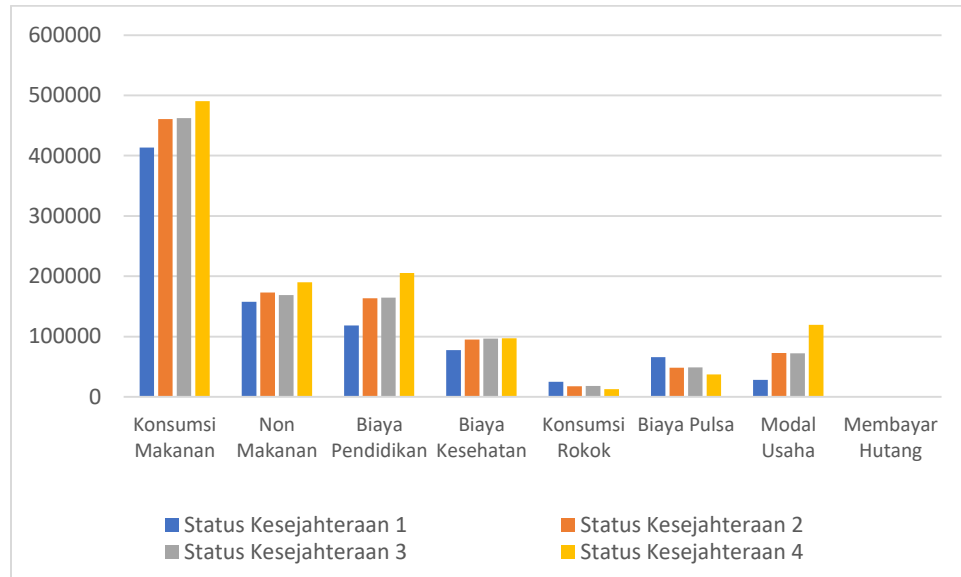
Gambar 4.11. Karakteristik Rata-Rata Pola Konsumsi Responden Kabupaten Bangka

Sumber : hasil survey, 2021

Berdasarkan Gambar 4.11. menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk yang berada pada data DTKS melakukan pengeluaran yang dominan terhadap makanan, selanjutnya terdapat Biaya pendidikan sebesar 14 persen dan membayar hutang sebesar 12 persen. Temuan selanjutnya diketahui bahwa pola pikir masyarakat dalam mengalokasikan pada modal usaha, biaya pulsa, biaya kesehatan, dan konsumsi rokok di Kabupaten Bangka masih rendah yaitu hanya sebesar 1 persen. Hal ini menunjukkan bahwa mobilitas masyarakat secara ekonomi dalam jangka panjang masih sulit untuk keluar dari garis kemiskinan. Untuk itu perlu adanya upaya pendampingan dalam merubah pola pikir masyarakat agar dapat berwirausaha kecil-kecilan ataupun menyisihkan sedikit alokasi dana bantuan yang ada, dengan tujuan jangka panjang akan menjadi sebuah rumah tangga mandiri.

4.2.11 Karakteristik Pola Konsumsi Responden di Kabupaten Bangka Selatan

Bagian ini melakukan pendalaman mengenai distribusi konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Bangka Selatan. Gambaran pola konsumsi responden Kabupaten Bangka Selatan dapat dilihat pada Gambar 4.12 berikut ini:



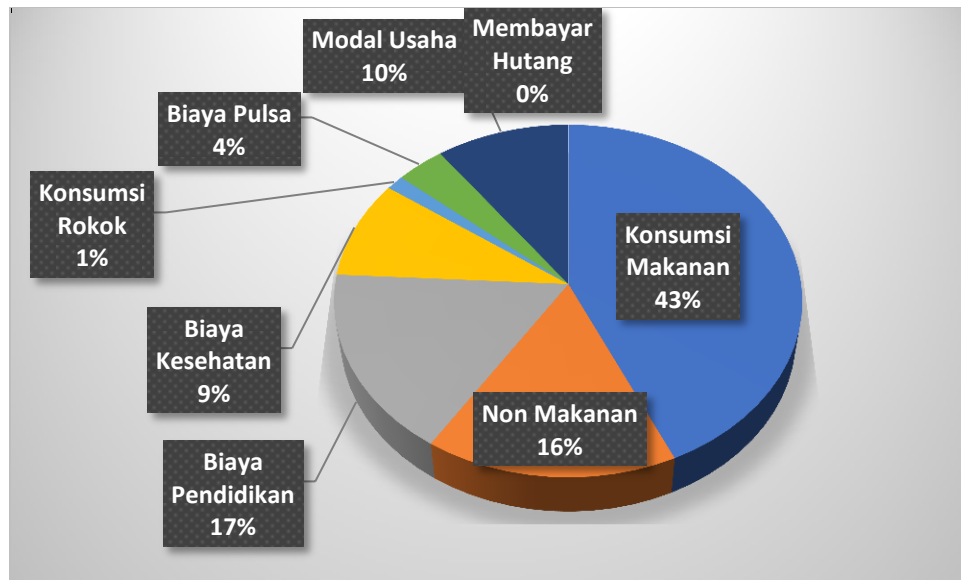
Gambar 4.12 Karakteristik Pola Konsumsi Responden Kabupaten Bangka Selatan

Sumber : hasil survey, 2021

Berdasarkan Gambar 4.12 menunjukkan bahwa konsumsi responden Kabupaten Bangka Selatan tertinggi digunakan untuk makanan, non makanan, biaya pendidikan, biaya kesehatan dan modal usaha. Sedangkan biaya konsumsi yang digunakan untuk konsumsi rokok, biaya pulsa dan membayar hutang masih rendah.

Konsumsi responden pada makanan, non makanan, biaya pendidikan, biaya kesehatan dan modal usaha berdasarkan status kesejahteraan menunjukkan bahwa responden dengan status kesejahteraan 4 paling tinggi dibandingkan responden dengan status kesejahteraan 1, 2, dan 3.

Setelah melakukan kompilasi rata-rata pengeluaran pada berbagai aspek konsumsi didapatkan hasil sebagai berikut ini:



Gambar 4.13 Karakteristik Rata-Rata Pola Pengeluaran Masyarakat di Kabupaten Bangka Selatan

Sumber : hasil survey, 2021

Berdasarkan Gambar 4.13 hasil menunjukkan bahwa konsumsi masyarakat Bangka Selatan cenderung lebih merata pada berbagai aspek. Data menunjukkan konsumsi terbesar masyarakat adalah konsumsi terhadap makanan sebesar 43 persen, selanjutnya biaya pendidikan sebesar 17 persen dan non makanan sebesar 16 persen. Selanjutnya modal usaha sebesar 10 persen, biaya kesehatan sebesar 9 persen, biaya pulsa sebesar 4 persen, biaya konsumsi rokok sebesar 1 persen, dan membayar hutang sebesar 0 persen. Sementara itu modal usaha di Bangka Selatan relative lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di Kabupaten Bangka.

4.3 HASIL ANALISIS

4.3.1. Hasil Regresi Pengaruh PKH Terhadap Biaya Pendidikan

Hasil regresi pengaruh PKH terhadap biaya pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Pengaruh Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Pendidikan

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	R ²
C	653839.0	38873.07	16.81985	0.0000	
Pendidikan	0.567779	0.144739	3.922773	0.0002	0.158008

Sumber : diolah peneliti, 2021

Berdasarkan Tabel 4.1 menunjukkan bahwa bantuan pemerintah berupa Program Keluarga Harapan (PKH) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendidikan dimana nilai probabilitas lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ ($0.0002 < 0,05$). Hasil koefisien determinasi atau R² sebesar 0.158008 atau 15,80 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa biaya pendidikan dipengaruhi oleh bantuan PKH sebesar 56,67 persen. Sedangkan sisanya (43.33 persen) dipengaruhi oleh faktor lain diluar bantuan PKH. Indikasi ini menunjukkan bahwa bantuan PKH tepat sasaran dimana teruji dari hasil regresi yang positif dan signifikan terhadap biaya pendidikan, artinya masyarakat dalam hal ini responden terpilih telah mengalokasikan bantuan PKH untuk biaya pendidikan.

4.3.2. Hasil Regresi Pengaruh PKH Terhadap Biaya Makanan

Hasil regresi pengaruh bantuan PKH terhadap biaya makanan dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Pengaruh Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Biaya Makanan

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	R ²
C	681747.4	47649.42	14.30757	0.0000	
Biaya Makanan	0.138781	0.094932	1.461895	0.1476	0.025401

Sumber : diolah peneliti, 2021

Berdasarkan Tabel 4.2 menunjukkan bahwa bantuan pemerintah berupa Program Keluarga Harapan (PKH) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap biaya makanan dimana nilai probabilitas lebih besar dari $\alpha = 0,05$ ($0.1476 > 0,05$). Hasil koefisien determinasi atau R² sebesar 0.025401 atau 2,54 persen. Hal ini dimaknai bahwa pemberian bantuan PKH tidak berpengaruh signifikan terhadap konsumsi makanan, diindikasikan memang bahwa bantuan PKH tidak diperuntukkan fokus pada makanan.

4.3.3. Hasil Regresi Pengaruh PKH Terhadap Biaya Kesehatan

Hasil regresi pengaruh bantuan PKH terhadap biaya kesehatan dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Pengaruh Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Biaya Kesehatan

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	R ²
C	718214.2	38298.60	18.75301	0.0000	
Biaya Kesehatan	0.368577	0.441359	0.835096	0.4061	0.008433

Sumber : diolah peneliti, 2021

Berdasarkan Tabel 4.3 menunjukkan bahwa bantuan pemerintah berupa Program Keluarga Harapan (PKH) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap biaya kesehatan dimana nilai probabilitas lebih besar dari $\alpha = 0,05$ ($0.4051 > 0,05$). Hasil koefisien determinasi atau R² sebesar 0.008433 atau 0,84 persen. Hal ini dimaknai bahwa PKH tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap biaya kesehatan masyarakat, dikarenakan masyarakat sebagai responden terpilih banyak menggunakan BPJS (Kartu Indonesia Sehat) dan bantuan lainnya untuk pengeluaran biaya kesehatan.

4.3.4. Hasil Regresi Pengaruh BPNT Terhadap Biaya Makanan

Hasil analisis regresi pengaruh BPNT terhadap biaya makanan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4 Pengaruh Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Terhadap Biaya Makanan

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	R ²
C	166049.3	8864.112	18.73276	0.0000	
Biaya Makanan	-0.033738	0.022458	-1.502310	0.1384	0.037455

Sumber : diolah peneliti, 2021

Berdasarkan Tabel 4.4 menunjukkan bahwa bantuan pemerintah berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap biaya makanan masyarakat dimana nilai probabilitas lebih besar dari $\alpha = 0,05$ ($0.1384 > 0,05$). Hasil koefisien determinasi atau R² sebesar 0.037455 atau 3,74 persen. Pemberian BPNT dirasakan sangat efektif, namun tidak signifikan dikarenakan terdapat beberapa masyarakat responden terpilih ada yang mengalokasikan biaya makanan dari skema bantuan lainnya.

4.3.5. Hasil Regresi Pengaruh PIP Terhadap Biaya Pendidikan

Hasil regresi pengaruh bantuan PIP terhadap pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5 Pengaruh Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Terhadap Pendidikan

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	R ²
C	60568.62	13206.75	4.59	0.0000	
Pendidikan	0.23038	.0510061	4.52	0.000	0.0901

Sumber : diolah peneliti, 2021

Berdasarkan Tabel 4.5 menunjukkan bahwa bantuan pemerintah berupa Program Indonesia Pintar berpengaruh positif dan signifikan terhadap biaya pendidikan dimana nilai probabilitas lebih rendah dari nilai $\alpha = 0,05$. Hasil koefisien determinasi atau R² sebesar 0.0901 atau 9,01 persen. Selanjutnya koefisien determinasi menunjukkan bahwa PIP memberikan pengaruh positif sebesar 23,038 persen terhadap biaya pendidikan. Hal ini dimaknai bahwa pemberian bantuan PIP dirasakan sangat efektif untuk membantu masyarakat dalam pemenuhan biaya pendidikan.

4.3.6. Hasil Regresi Parsial

Setelah melakukan Regresi parsial untuk melihat pengaruh bantuan sosial terhadap pola konsumsi masyarakat penerima bantuan, maka didapatkan hasil regresi sebagai berikut ini.

Tabel 4.6 Hasil Koefisien Regresi Parsial

Jenis Pengeluaran	Koefisien Terhadap Bantuan	Signifikansi	Tingkat Signifikansi
Konsumsi Makanan	0.0446515	Signifikan	0.003
Konsumsi Non Makanan	-0.0002933	Tidak Signifikan	0.753
Biaya Pendidikan	0.0004325	Tidak Signifikan	0.931
Biaya Kesehatan	0.0015755	Tidak Signifikan	0.657
Pengeluaran Rokok	-0.0013457	Tidak Signifikan	0.546
Pengeluaran Pulsa Hp	0.0055012	Signifikan	0.043
Modal Usaha	0.0387345	Signifikan	0.006
Hutang	-0.003506	Tidak Signifikan	0.922

Sumber : Data Diolah peneliti, 2021

Penelitian ini juga melakukan analisis data bantuan sosial secara komposit terhadap beberapa jenis pengeluaran yang sudah dipetakan pada kerangka berpikir. Bantuan sosial secara komposit memberikan pengaruh terhadap 3 komponen seperti Makanan, Pulsa Hp dan Modal Usaha. Hasil analisis data menunjukkan bahwa terdapat beberapa pengeluaran konsumsi yang

terpengaruh akibat dari pemberian bantuan terhadap masyarakat atau dapat dikatakan bahwa masyarakat masih sangat memerlukan bantuan dari pemerintah dalam menopang kehidupannya. Berdasarkan Tabel 4.6. diketahui terdapat 3 (tiga) jenis pengeluaran yang sangat berpengaruh yaitu, makanan, pulsa Hp, dan investasi usaha.

Jenis pengeluaran konsumsi berupa makanan memiliki nilai koefisien terhadap bantuan sebesar 0.0446515 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.003 lebih kecil dari 0.05. Pada jenis pengeluaran konsumsi untuk biaya pulsa memiliki nilai koefisien terhadap bantuan sebesar -0.0055012 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.043 lebih kecil dari 0.05. Serta untuk pengeluaran konsumsi berupa investasi usaha memiliki nilai koefisien sebesar 0.0387345 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.006 lebih kecil dari 0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bantuan sosial secara komposit hanya berpengaruh signifikan terhadap jenis pengeluaran yaitu makanan, biaya pulsa, dan investasi usaha. Dapat disimpulkan bahwa dana bantuan pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengeluaran masyarakat khususnya pada pengeluaran makanan, pulsa Hp dan investasi usaha.

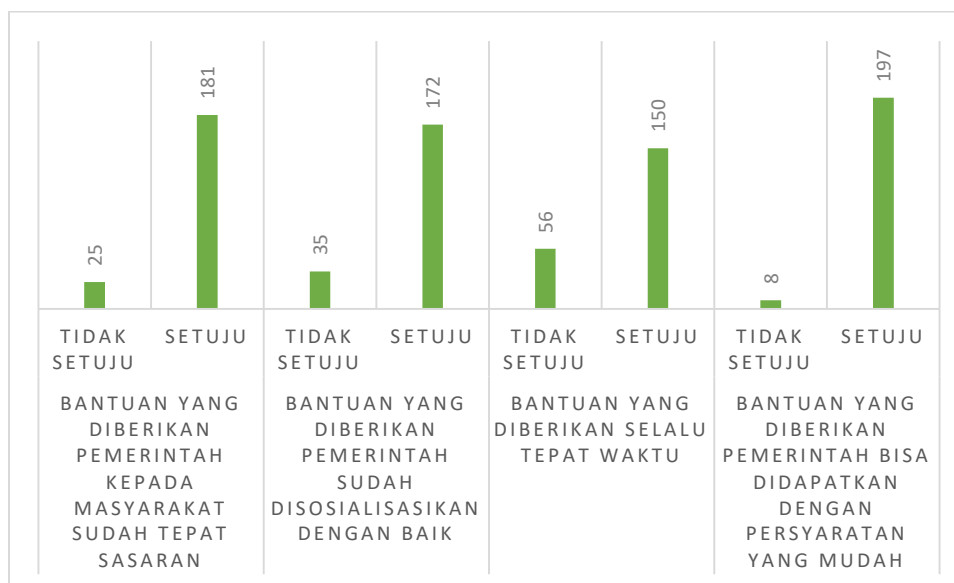
Sedangkan pemberian bantuan tidak berpengaruh signifikan terhadap jenis pengeluaran seperti konsumsi barang, pendidikan, kesehatan, biaya rokok, utilitas rumah tangga dan cicilan hutang. Jenis pengeluaran konsumsi berupa konsumsi barang memiliki nilai koefisien terhadap bantuan sebesar -0.0002933 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.753 lebih besar dari 0.05. Pada jenis pengeluaran konsumsi untuk biaya pendidikan memiliki nilai koefisien terhadap bantuan sebesar 0.0004325 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.931 lebih besar dari 0.05. Pengeluaran konsumsi berupa biaya kesehatan memiliki nilai koefisien sebesar 0.0015755 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.657 lebih besar dari 0.05. Pada jenis pengeluaran konsumsi untuk biaya rokok memiliki nilai koefisien terhadap bantuan sebesar -0.0013457 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.546 lebih besar dari 0.05. Jenis pengeluaran konsumsi berupa biaya utilitas rumah tangga memiliki nilai koefisien terhadap bantuan sebesar -0.0002857 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.95 lebih besar dari 0.05. Serta pengeluaran konsumsi berupa biaya untuk cicilan hutang memiliki nilai koefisien sebesar -0.003506 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.922 lebih besar dari 0.05.

Dalam melakukan analisis parsial *least square* kajian ini menggunakan variabel umur, tingkat pendidikan dan total pendapatan sebagai variabel kontrol. Dalam hal ini variabel kontrol

digunakan sebagai instrumen untuk menghilangkan bias pengaruh antara variabel bantuan dengan variabel konsumsi.

4.4 Persepsi Masyarakat Mengenai Program Bantuan

Persepsi masyarakat Kabupaten Bangka dan Bangka Selatan mengenai program bantuan dapat dilihat pada Gambar 4.10



Gambar 4.14 Persepsi Masyarakat Terhadap Program Bantuan

Sumber : diolah peneliti, 2021

Berdasarkan Gambar 4.14 menunjukkan bahwa persepsi masyarakat yang memilih setuju mengenai bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat sudah tepat sasaran sebanyak 181 responden dan yang memilih tidak setuju sebanyak 25 responden, yang memilih setuju dengan bantuan yang diberikan pemerintah sudah disosialisasikan dengan baik sebanyak 172 responden dan yang memilih tidak setuju sebanyak 35 responden, yang memilih setuju dengan bantuan yang diberikan selalu tepat waktu sebanyak 150 responden dan yang memilih tidak setuju sebanyak 56 responden, kemudian yang memilih setuju dengan bantuan yang diberikan pemerintah bisa didapatkan dengan persyaratan yang mudah sebanyak 197 dan yang memilih tidak setuju sebanyak 8 responden.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh pemberian bantuan PKH terhadap biaya pendidikan, biaya makanan dan biaya kesehatan
 - a. Pengaruh pemberian bantuan PKH terhadap biaya pendidikan menemukan hasil bahwa bantuan PKH berpengaruh positif dan signifikan terhadap biaya pendidikan, hal ini dimaknai bahwa masyarakat telah mengalokasikan bantuan PKH untuk biaya pendidikan.
 - b. Pengaruh pemberian bantuan PKH terhadap konsumsi makanan menemukan hasil bahwa bantuan PKH berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap makanan, hal ini dimaknai bahwa pemberian bantuan PKH tidak diperuntukkan fokus pada makanan.
 - c. Pengaruh pemberian bantuan PKH terhadap biaya kesehatan menemukan hasil bahwa bantuan PKH tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap biaya kesehatan masyarakat, hal ini dimaknai bahwa masyarakat sebagai responden terpilih banyak menggunakan BPJS (Kartu Indonesia Sehat) dan bantuan lainnya untuk pengeluaran biaya kesehatan.
2. Pengaruh pemberian bantuan BPNT terhadap biaya makanan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap biaya makanan masyarakat, hal ini dimaknai bahwa terdapat beberapa masyarakat yang mengalokasikan biaya makanan dari skema bantuan lainnya.
3. Pengaruh pemberian bantuan PIP terhadap pendidikan berpengaruh positif dan signifikan, hal ini dimaknai bahwa pemberian bantuan PIP digunakan masyarakat sepenuhnya untuk pemenuhan biaya pendidikan.
4. Kompilasi bantuan yang diberikan secara keseluruhan kepada masyarakat berpengaruh terhadap biaya makanan, pulsa dan modal usaha.
5. Hasil persepsi penerima bantuan menyebutkan, bahwa masyarakat merasa tepat menerima bantuan tersebut, telah dilakukan sosialisasi terkait dengan jenis-jenis bantuan, bantuan disalurkan tepat waktu dan persyaratan yang mudah bagi penerima bantuan

5.2 Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil survei, analisis dan kesimpulan yang telah dikemukakan dari pembahasan maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Dilakukannya updating data penerima bantuan secara berkala oleh Dinas Sosial, agar penerima bantuan adalah masyarakat yang masih hidup dan memang yang berhak menerimanya.
2. Dilakukannya evaluasi skema bantuan yang ada oleh Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Bappeda apakah bantuan tersebut telah sesuai diberikan dalam bentuk produk (barang), kartu atau uang tunai.
3. Dilakukannya evaluasi kembali terhadap bantuan PKH untuk biaya kesehatan, karena masyarakat banyak menggunakan Kartu Indonesia Sehat dalam pemenuhan biaya kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Badan Pusat Statistik. (2020). Berita Resmi Statistik Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Agustus 2020
- Bourguignon, F. (2004). The Poverty-Growth-Inequality Triangle. World Bank: Presentation Paper at Indian Council for Research on International Economic Relation 4 th February 2004
- Cuenca, J. S. (2008). *Benefit Incidence Analysis of Public Spending on Education in the Philippines: A Methodological Note* (No. 2008-09). Makati City. Retrieved from <http://hdl.handle.net/10419/127971>
- Demery, L. (2000). *Benefit Incidence: a Practitioner's Guide* (1 No. 1). Poverty and Social Development Group Africa Region. Wahington DC.
- Ferezagia, Debrina Vita. (2018). Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora Teapan*. Vol. 1, No. 1, Hal. 1-6.
- Ghozali, Imam. (2016). Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Habibullah, M. Deputi Bidang Statistik Produksi, BPS. (2020). Enam Faktor yang mempengaruhi Kemiskinan Versi BPS. Kontan.co.id. (diakses pada 28 Maret 2020)
- <https://nasional.kontan.co.id/news/enam-faktor-yang-mempengaruhi-tingkat-kemiskinan-versi-bps> (diakses pada 28 Maret 2021)
- <https://nasional.kontan.co.id/news/strategi-pemerintah-turunkan-kemiskinan-hingga-65-pada-2024?page> (diakses pada 28 Maret 2021)
- <https://indonesiapintar.kemdikbud.go.id/>
- Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2021, <https://kemensos.go.id/ar/kube> (diakses pada 1 April 2021)
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2020, <https://www.prakerja.go.id/> (diakses pada 1 April 2021)
- Kuncoro, M. (2006). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- M. T. Binti. (2016). Analisa Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan Di Kalimantan Tengah. *Jurnal Komunikasi Bisnis dan Manajemen*, Vol. 3, pp. 69–78.
- Made, I. W. (2006). Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis. Yogyakarta: Andi.

- Mahendra, A. (2019). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita, Inflasi dan Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*. 3(1)
- Mankiw, Gregory. N. (2007). *Teori Makro Ekonomi Edisi Keenam*. Jakarta: Erlangga.
- Nazir, Moh. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Pusdatin Kesos. (2020). *Pegelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)*. Paparan Pusat Pendataan dan Informasi Kesejahteraan Sosial, 16 Juli 2020
- Remi, Sutiyastie S. dan Prijono Tjiptoherijanto. 2002. *Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- S. Sudiar. (2015). Konsolidasi Potensi Pembangunan: Studi Tentang Penanganan Kemiskinan di Kecamatan Muara Muntai-Kutai Kartanegara. *Jurnal Paradigma*, Vol. 4, pp. 69–79.
- Safuridar dan Novera Dwi Suci. (2017). Analisis Dampak Bantuan Program Penanggulangan Kemiskinan terhadap Kehidupan Masyarakat Miskin di Desa Perkebunan Julok Rayeuk Utara Kecamatan Indra Makmu Kabupaten Aceh Timur. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 8, No. 2, Hal. 149-159
- Sofah, Fidianing, *et al.* (2020). Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Sidoarjo. *Syntax Idea*. Vol. 2, No. 6, Hal. 26-40.
- Sukirno, Sadono. (2012). *Makro ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga* Jakarta: PT. Raja Gofindo Persada
- Sulistyo, Joko. (2012). *6 Hari Jago SPSS 17*. Jakarta: Cakrawala.
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. (2006). *Pembangunan Ekonomi (Edisi Kesembilan, Jilid I)*. Jakarta: Erlangga
- World Bank. (2004). *Mewujudkan Pelayanan Umum bagi Masyarakat Miskin*. The World Bank: Jakarta.
- Yacoub, Y. (2010). Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Eksos*. Vol.8

LAMPIRAN

No.	Kecamatan (Kabupaten Bangka Selatan)	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Kecamatan (Kabupaten Bangka)	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Desil 5
1	Air Gegas	4	14	3	9	Mendo Barat	4	5	7	2	8
2	Toboali	8	9	9	9	Sungailiat	2	1	2	23	9
3	Tukak Sadai	9	9	9	9	Belinyu	10	10	9	3	5
	Total	21	32	21	27	Total	16	16	18	28	22
		100					100				

Makanan

Source	SS	df	MS	Number of obs =	173
Model	1.0726e+12	4	2.6816e+11	F(4, 168) =	2.62
Residual	1.7172e+13	168	1.0221e+11	Prob > F =	0.0366
Total	1.8244e+13	172	1.0607e+11	R-squared =	0.0588
				Adj R-squared =	0.0364
				Root MSE =	3.2e+05

makanan	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
umur	-910.3205	2023.128	-0.45	0.653	-4904.35	3083.709
pendidikan	-8945.783	14580.8	-0.61	0.540	-37730.99	19839.42
totalpendapatan	.0101026	.0139064	0.73	0.469	-.0173512	.0375563
totalbantuan	.0446515	.0148703	3.00	0.003	.0152948	.0740083
_cons	357220.3	165429.8	2.16	0.032	30631.25	683809.3

Biaya Kesehatan

Source	SS	df	MS	Number of obs =	173
Model	3.3583e+09	4	839581887	F(4, 168) =	0.15
Residual	9.7132e+11	168	5.7817e+09	Prob > F =	0.9649
Total	9.7468e+11	172	5.6668e+09	R-squared =	0.0034
				Adj R-squared =	-0.0203
				Root MSE =	76037

biayakesehatan	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
umur	6.85479	481.169	0.01	0.989	-943.0619	956.7714
pendidikan	-1178.566	3467.813	-0.34	0.734	-8024.672	5667.54
totalpendapatan	.0017454	.0033074	0.53	0.598	-.004784	.0082749
totalbantuan	.0015755	.0035367	0.45	0.657	-.0054065	.0085575
_cons	20140.85	39344.86	0.51	0.609	-57533.18	97814.88

Biaya Pendidikan

Source	SS	df	MS	Number of obs =	173
Model	3.3372e+10	4	8.3431e+09	F(4, 168) =	0.73
Residual	1.9307e+12	168	1.1492e+10	Prob > F =	0.5754
Total	1.9641e+12	172	1.1419e+10	R-squared =	0.0170
				Adj R-squared =	-0.0064
				Root MSE =	1.1e+05

biayapendidikan	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]
umur	-283.7023	678.387	-0.42	0.676	-1622.964 1055.559
pendidikan	4504.014	4889.175	0.92	0.358	-5148.123 14156.15
totalpendapatan	.0048455	.004663	1.04	0.300	-.0043602 .0140512
totalbantuan	.0004325	.0049863	0.09	0.931	-.0094113 .0102763
_cons	325.6359	55471.23	0.01	0.995	-109184.9 109836.1

Membayar Hutang

Source	SS	df	MS	Number of obs =	173
Model	7.2542e+11	4	1.8136e+11	F(4, 168) =	0.31
Residual	9.8697e+13	168	5.8748e+11	Prob > F =	0.8719
Total	9.9422e+13	172	5.7803e+11	R-squared =	0.0073
				Adj R-squared =	-0.0163
				Root MSE =	7.7e+05

membayarhutan~n	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]
umur	4547.386	4850.277	0.94	0.350	-5027.96 14122.73
pendidikan	-271.9171	34956.24	-0.01	0.994	-69282 68738.17
totalpendapatan	-.0153384	.0333393	-0.46	0.646	-.0811565 .0504796
totalbantuan	-.003506	.0356503	-0.10	0.922	-.0738863 .0668744
_cons	-153608.7	396603.8	-0.39	0.699	-936578.2 629360.7

Membeli Pulsa

Source	SS	df	MS	Number of obs =	173
Model	1.6123e+10	4	4.0307e+09	F(4, 168) =	1.20
Residual	5.6261e+11	168	3.3489e+09	Prob > F =	0.3112
Total	5.7874e+11	172	3.3648e+09	R-squared =	0.0279
				Adj R-squared =	0.0047
				Root MSE =	57870

membelipulsa	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
umur	-306.0526	366.2023	-0.84	0.404	-1029.004	416.8986
pendidikan	-909.5431	2639.242	-0.34	0.731	-6119.895	4300.809
totalpendapatan	-.0006341	.0025172	-0.25	0.801	-.0056034	.0043353
totalbantuan	-.0055012	.0026916	-2.04	0.043	-.010815	-.0001874
_cons	55112.43	29944.11	1.84	0.067	-4002.789	114227.6

Membeli Rokok

Source	SS	df	MS	Number of obs =	173
Model	2.7584e+09	4	689599760	F(4, 168) =	0.30
Residual	3.8366e+11	168	2.2837e+09	Prob > F =	0.8763
Total	3.8641e+11	172	2.2466e+09	R-squared =	0.0071
				Adj R-squared =	-0.0165
				Root MSE =	47788

membelirokok	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
umur	-155.2984	302.4031	-0.51	0.608	-752.2982	441.7014
pendidikan	-721.2426	2179.437	-0.33	0.741	-5023.856	3581.371
totalpendapatan	-.0013528	.0020786	-0.65	0.516	-.0054564	.0027508
totalbantuan	-.0013457	.0022227	-0.61	0.546	-.0057337	.0030424
_cons	27479.1	24727.3	1.11	0.268	-21337.16	76295.37

Investasi Usaha

Source	SS	df	MS	Number of obs =	173
Model	1.5242e+12	4	3.8104e+11	F(4, 168) =	4.26
Residual	1.5043e+13	168	8.9539e+10	Prob > F =	0.0026
Total	1.6567e+13	172	9.6318e+10	R-squared =	0.0920
				Adj R-squared =	0.0704
				Root MSE =	3.0e+05

investasiusaha	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]
umur	-2436.272	1893.547	-1.29	0.200	-6174.485 1301.94
pendidikan	5348.691	13646.91	0.39	0.696	-21592.83 32290.21
totalpendapatan	.0276571	.0130157	2.12	0.035	.0019618 .0533524
totalbantuan	.0387345	.0139179	2.78	0.006	.011258 .066211
_cons	110905.3	154834	0.72	0.475	-194765.7 416576.4

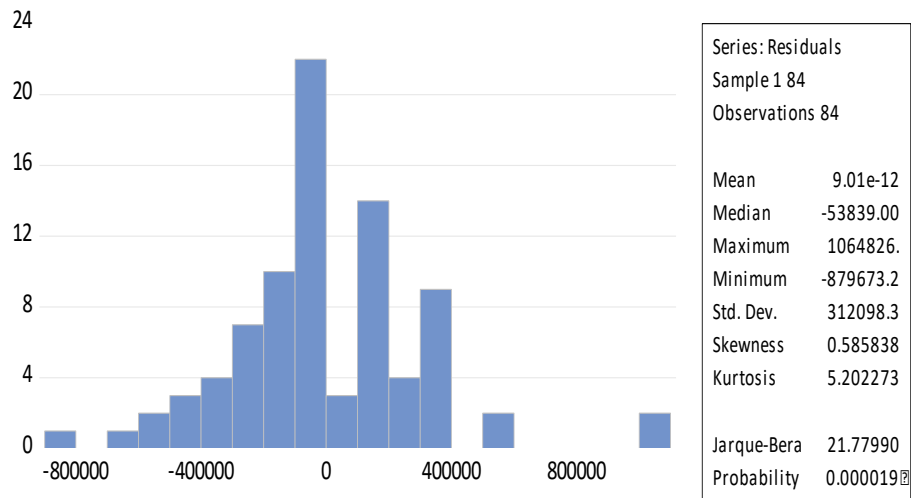
Utilitas

Source	SS	df	MS	Number of obs =	173
Model	7.0121e+10	4	1.7530e+10	F(4, 168) =	1.85
Residual	1.5889e+12	168	9.4578e+09	Prob > F =	0.1209
Total	1.6590e+12	172	9.6455e+09	R-squared =	0.0423
				Adj R-squared =	0.0195
				Root MSE =	97251

utilitas	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]
umur	-916.1124	615.4098	-1.49	0.138	-2131.045 298.8205
pendidikan	-2122.344	4435.295	-0.48	0.633	-10878.44 6633.75
totalpendapatan	.0099284	.0042301	2.35	0.020	.0015773 .0182795
totalbantuan	-.0002857	.0045234	-0.06	0.950	-.0092157 .0086442
_cons	205926.5	50321.64	4.09	0.000	106582.3 305270.7

Dependent Variable: Program Keluarga Harapan (PKH)
Method: Least Squares
Date: 12/17/21 Time: 16:25
Sample: 1 84
Included observations: 84

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	653839.0	38873.07	16.81985	0.0000
Pendidikan	0.567779	0.144739	3.922773	0.0002
R-squared				
		0.158008	Mean dependent var	725892.9
Adjusted R-squared		0.147740	S.D. dependent var	340124.1
S.E. of regression		313995.5	Akaike info criterion	28.17567
Sum squared resid		8.08E+12	Schwarz criterion	28.23354
Log likelihood		-1181.378	Hannan-Quinn criter.	28.19893
F-statistic		15.38814	Durbin-Watson stat	1.693709
Prob(F-statistic)		0.000181		



Dependent Variable: RESABS
Method: Least Squares
Date: 12/17/21 Time: 16:27
Sample: 1 84
Included observations: 84

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	168033.2	21762.21	7.721331	0.0000
Pendidikan	0.486728	0.081029	6.006843	0.0000

Dependent Variable: Program Keluarga Harapan (PKH)

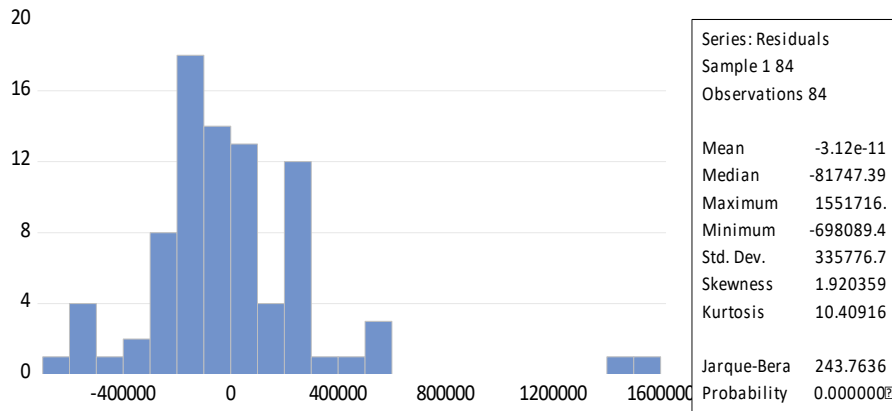
Method: Least Squares

Date: 12/17/21 Time: 17:33

Sample: 1 84

Included observations: 84

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	681747.4	47649.42	14.30757	0.0000
Biaya Makanan	0.138781	0.094932	1.461895	0.1476
R-squared	0.025401	Mean dependent var		725892.9
Adjusted R-squared	0.013515	S.D. dependent var		340124.1
S.E. of regression	337817.9	Akaike info criterion		28.32192
Sum squared resid	9.36E+12	Schwarz criterion		28.37980
Log likelihood	-1187.521	Hannan-Quinn criter.		28.34519
F-statistic	2.137138	Durbin-Watson stat		1.777866
Prob(F-statistic)	0.147592			



Dependent Variable: RESABS

Method: Least Squares

Date: 12/17/21 Time: 17:38

Sample: 1 84

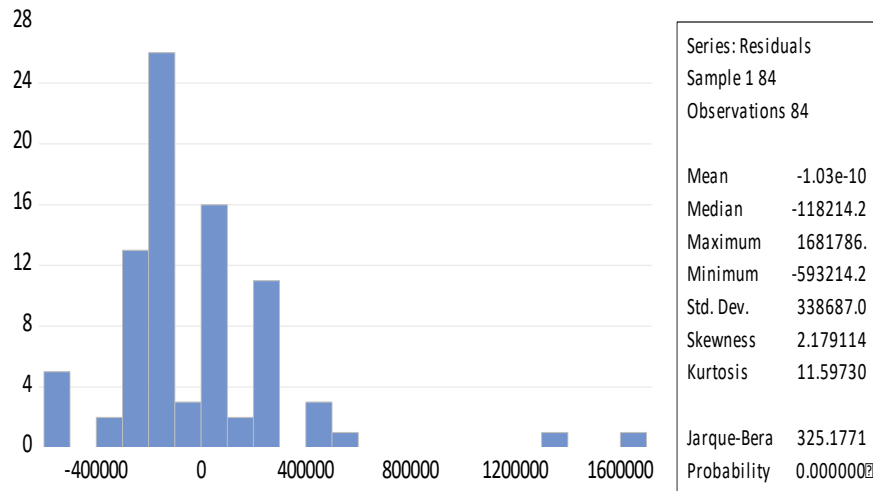
Included observations: 84

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	178412.2	34268.27	5.206339	0.0000
X	0.146062	0.068273	2.139383	0.0354

Dependent Variable: Program Keluarga Harapan (PKH)
Method: Least Squares
Date: 12/17/21 Time: 16:34
Sample: 1 84
Included observations: 84

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	718214.2	38298.60	18.75301	0.0000
Kesehatan	0.368577	0.441359	0.835096	0.4061

R-squared	0.008433	Mean dependent var	725892.9
Adjusted R-squared	-0.003659	S.D. dependent var	340124.1
S.E. of regression	340745.9	Akaike info criterion	28.33918
Sum squared resid	9.52E+12	Schwarz criterion	28.39706
Log likelihood	-1188.246	Hannan-Quinn criter.	28.36245
F-statistic	0.697385	Durbin-Watson stat	1.800659
Prob(F-statistic)	0.406090		



Dependent Variable: RESABS
Method: Least Squares
Date: 12/17/21 Time: 16:36
Sample: 1 84
Included observations: 84

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	234981.2	27965.08	8.402666	0.0000
Kesehatan	-0.308570	0.322274	-0.957477	0.3411

Dependent Variable: Pengaruh Bantuan Pangan Non

Tunai (BPNT)

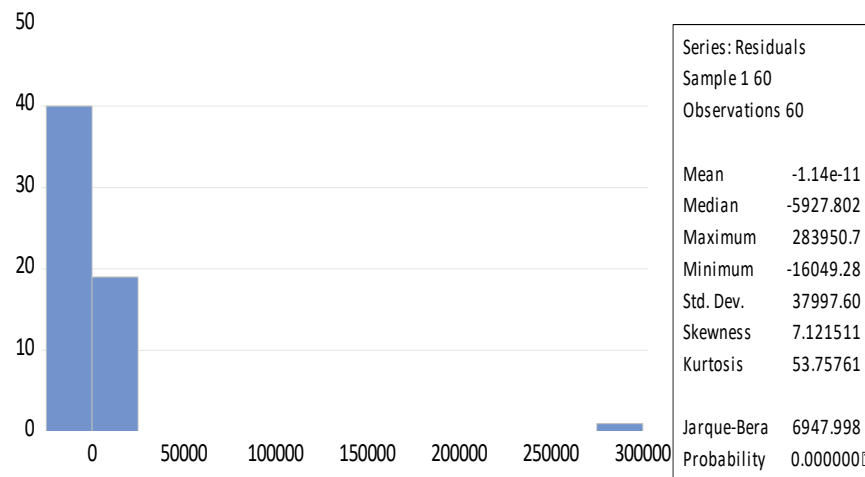
Method: Least Squares

Date: 12/16/21 Time: 16:31

Sample: 1 60

Included observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	166049.3	8864.112	18.73276	0.0000
Biaya Makanan	-0.033738	0.022458	-1.502310	0.1384
R-squared	0.037455	Mean dependent var		155000.0
Adjusted R-squared	0.020860	S.D. dependent var		38729.83
S.E. of regression	38323.76	Akaike info criterion		23.97829
Sum squared resid	8.52E+10	Schwarz criterion		24.04810
Log likelihood	-717.3488	Hannan-Quinn criter.		24.00560
F-statistic	2.256934	Durbin-Watson stat		1.072354
Prob(F-statistic)	0.138443			



Dependent Variable: RESABS

Method: Least Squares

Date: 12/17/21 Time: 12:44

Sample: 1 60

Included observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	25800.20	8113.465	3.179924	0.0024
X	-0.042112	0.020556	-2.048663	0.0450

PIP terhadap Pendidikan

Source	SS	df	MS	Number of obs =	208
Model	6.5079e+11	1	6.5079e+11	F(1, 206) =	20.40
Residual	6.5710e+12	206	3.1898e+10	Prob > F =	0.0000
Total	7.2218e+12	207	3.4888e+10	R-squared =	0.0901
				Adj R-squared =	0.0857
				Root MSE =	1.8e+05

Pendidikan	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
PIP	.2303888	.0510061	4.52	0.000	.1298278	.3309498
_cons	60568.62	13206.75	4.59	0.000	34530.91	86606.34

